



**ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, UMKM, PDRB
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH
KARESIDENAN BASUKI TAHUN 2000 - 2014**

SKRIPSI

Oleh:

Rida'ie

NIM 100810101052

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2017



**ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, UMKM, PDRB
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH
KARESIDENAN BASUKI TAHUN 2000 – 2014**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Rida'ie

NIM 100810101052

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan puji syukur yang tak terhingga pada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Hj. Atun dan Ayahanda H. Faedi tercinta, yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhingga selama ini;
2. Guru-guru sejak Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi terhormat, telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Teman-teman Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan yang banyak membantu saya, baik berupa motivasi dan kebersamaan dalam memperoleh gelar sarjana;
4. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum
kecuali kaum itu sendiri yang mengubah
apa yang ada pada diri mereka

(Terjemahan Surah Ar-Ra'd; 11)

Kau tak akan pernah mampu menyebrangi lautan sampai
kau berani berpisah dengan daratan

(Christopher Columbus)

Bermimpilah seakan kau akan hidup selamanya. Hiduplah
seakan kau akan mati hari ini

(James Dean)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rida'ie

NIM : 100810101052

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, UMKM, PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Karesidenan Basuki Tahun 2000 – 2014” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah di ajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Desember 2017

Yang menyatakn

Rida'ie

NIM. 100810101052

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, UMKM, PDRB
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH
KARESIDENAN BASUKI TAHUN 2000 - 2014**

Oleh

Rida'ie

NIM 100810101052

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes

Dosen Pembimbing II : Dr. Regina Niken W., SE, M.Si

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, UMKM, PDRB
Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Karesidenan Basuki
Tahun 2000 - 2014

Nama Mahasiswa : Rida'ie

NIM : 100810101052

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Moneter

Tanggal Persetujuan : 18 Desember 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes.
NIP. 19641108 198902 2 001

Dr. Regina Niken W., SE, M.Si
NIP. 19740913 200112 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes
NIP. 19641108 198902 2 001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, UMKM, PDRB
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH
KARESIDENAN BASUKI TAHUN 2000 - 2014**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Rida'ie

NIM : 100810101052

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

18 Desember 2017

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Siswoyo Hari S., SE., M.Si
(.....)
NIP. 19680715 199303 1 001

2. Sekretaris : Dr. Rafael Purtomo, SE., M.Si
(.....)
NIP. 19581024 198702 2 002

3. Anggota : Dra. Nanik Istiyani, M.Si
(.....)
NIP. 19610622 198702 2 002

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Foto 4 X 6

warna

Dr. M. Miqdad, SE., M.M., Ak.
NIP. 19710727 199512 1 001

*Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, UMKM, dan PDRB
Terhadap Penerimaan Pajak Daerah
Karesidenan Basuki Tahun 2000-2014*

Rida'ie

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Jember*

ABSTRAK

Pembangunan nasional merupakan pembanguan yang dilaksanakan disemua aspek kehidupan, terutama pada aspek ekonomi. Pembangunan nasional dengan pemahaman bahwa pembangunan ekonomi identik dengan pertumbuhan. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkannya. Maka peran serta pemerintah dan masyarakat dalam mendukung segala program yang di canangkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini akan terlaksana jika penerimaan pemerintah dapat mencapai target yang di inginkannya. Salah satu instrument penerimaan pemerintah yang sangat berperan adalah penerimaan pajak. Akan tetapi penerimaan pajak akan terlaksana jika beberapa faktor pendukung atau faktor yang berperan terhadap penerimaan pajak dapat bekerja sama denga baik. Hal ini adalah Jumlah penduduk, UMKM dan PDRB faktor utama pendukung tercapainya penerimaan pajak yang maksimal. Dalam hal ini, Jumlah Penduduk, UMKM, dan PDRB seberapa besar pengaruhnya terhadap penerimaan Pajak yang objeknya karesidenan Basuki yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo. Dalam mengkaji pengaruh Jumlah Penduduk, UMKM, dan PDRB di daerah Karesidenan Basuki terhadap Penerimaan Pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk, UMKM, dan PDRB terhadap Penerimaan Pajak Daerah Karesidenan Basuki. Metode analisis yang digunakan adalah metode kausal dengan metode regresi data panel model *fixed effect*. Hasil anallisis dengan regresi data panel menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh terhadap hipotesis penerimaan pajak.

Kata Kunci: Penerimaan Pemerintah, Penerimaan Pajak, Karesidenan Basuki, Regresi Data Panel, Model *Fixxed Effect*

*Influence Analysis of Population, UMKM, and PDRB
Against Regional Tax Revenue
Basuki Residency in 2000-2014*

Rida'ie

*The Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics
and Business, University of Jember*

ABSTRACT

National development is the development carried out in all aspects of life, especially in economic aspects. National development with the understanding that economic development is synonymous with growth. To achieve the desired economic growth. So the role of government and society in supporting all the programs in the government by government, both central government and local government. This will be accomplished if the government's revenue can reach the desired target. One of the most important government revenue instruments is tax revenue. However, tax revenues will be realized if some supporting factors or factors that contribute to tax revenue can work together well. This is the number of population, MSME and GRDP the main factor supporting the achievement of the maximum tax revenue. In this case, Total Population, UMKM, and PDRB how big the influence to acceptance of Tax object Basuki residency ie Jember District, Banyuwangi, Bondowoso and Situbondo. In assessing the effect of Total Population, UMKM, and GRDP in Basuki Residency to Tax Receipts. The purpose of this study is to determine the effect of Population, SMEs, and GRDP to the Regional Tax Revenue Basuki. The method of analysis used is a causal method with regression method of panel data of fixed effect model. The results of anallisis with panel data regression showed that there is a significant influence on tax revenue. Thus it can be concluded that the results of this study indicate an influence on the hypothesis of tax revenue.

Keyword: Government Revenue, Tax Receipts, Basuki Residency, Panel Data Regression, Fixxed Effect Model

RINGKASAN

Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, UMKM, dan PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Karesidenan Basuki Tahun 2000-2014; Rida'ie, 1008101010152; 2017; Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Rahmanta (2011) Instrumen kebijakan fiskal salah satunya adalah pajak. Perpajakan merupakan primadona komponen yang paling besar di suatu Negara dalam menopang pembiayaan dan pembangunan suatu Negara. Pajak selain merupakan sumber dana dari pembiayaan Negara, pajak juga merupakan sumber dana penerimaan suatu Negara. Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak paten dari pemerintah dimana pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang dan juga pungutannya dapat dipaksakan terhadap objek pajak.

Pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana pemerintah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru untuk merangsang perkembangan kegiatan ekonomi.

Pheni, C., (2005) otonomi daerah merupakan bentuk system penyerahan urusan pemerintahan dan pelimpahan wewenang kepada daerah yang berada di bawahnya. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari penelitian ini adalah melihat pengaruh antara Jumlah penduduk, UMKM, dan PDRB terhadap penerimaan pajak daerah karesidenan basuki. Oleh karena itu, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jumlah Penduduk, UMKM, dan PDRB daerah karesidenan basuki tahun 2000-2010 yang di ambil dari Badan Pusat Statistika (BPS). Metode analisis yang digunakan terfokus pada analisis regresi linear dengan model statis yaitu *ordinary least squary* (OLS), data panel dengan model *Fixed effect*.

Dari hasil analisis regresi data panel dengan model *fixed effect* dihasilkan bahwa terdapat pengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut terbukti dengan pengaruh Jumlah Penduduk dan UMKM yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Hanya saja pada variabel PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Terbukti pada nilai probabilitas Jumlah Penduduk dan UMKM lebih kecil dari $\alpha = 5\% = 0.0500$, sedangkan untuk PDRB nilai probabilitasnya lebih besar dari $\alpha = 5\% = 0.0500$. Akan tetapi berbeda hasilnya dari pengujian secara serentak, bahwa Jumlah penduduk, UMKM, dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Di buktikan dari nilai probabilitasnya F-hitung 0.000000 lebih kecil dari $\alpha = 5\% = 0.0500$. Dengan kata lain, fenomena penerimaan pajak pada umumnya sangat di pengaruhi oleh ketiga variabel tersebut pada tahun 2000 – 2014.

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrhim. Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya serta sholawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW atas petunjuk kebenaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, UMKM, PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Karesidenan Basuki Tahun 2000 – 2014”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik berupa motivasi, nasehat, saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan tidak menghilangkan rasa hormat yang tulus, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Sebastian Viphindartin, M.Kes selaku Dosen Pembimbing I yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran serta kritik dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Regina Niken W., SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing penulis dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan ketulusan dalam penyusunan skripsi ini. Serta semua inspirasi, pemahaman, dan dinamisasi perjalanan menuntut ilmu dengan nuansa dan konsep berilmu pengetahuan yang sesungguhnya;
3. Bapak DEkan
4. Ibu Sebastiana Viphindartin, M.Kes selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Bapak Dr. Rafael Purtomo, SE., M.Si terima kasih atas inspirasi, motivasi, bantuan, dan dukungan yang tidak dapat di kuantifikasi, sehingga penulis

dapat memperoleh pengalaman dan pemahaman dengan variasi bangku akademik yang berbeda:

6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember serta Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Perpustakaan Pusat;
7. Ibunda Hj. Atun dan Ayahanda H. Faedi, terima kasih yang tak terhingga ananda ucapkan atas doa , kasih sayang, kerja keras, kesabaran, dan semua pengorbanan selama ini;
8. Keluarga besar Uyut Syarkawi tercinta, terimakasih atas doa, kasih sayang dan dukungan yang tak pernah surut bagi penulis;
9. Kakak-kakakku Rulik dan Sama'udin, Najmah dan Basri, Lenny Lyla Rachman terimakasih atas motivasi, nasehat, dan semua pengorbanan. Serta Adeku tercinta Atika Kamilah semoga dahaga ilmu pengetahuan tak pernah lekang dalam diri keluarga kita;
10. Teman-teman seperjuangan, Maftuh, Alinda, Andre, Ima, Yogi, Malik, Fandi, Ryan, Danny, Laili, Agil, dan Laili, terimakasih telah menjadi keluarga yang sudi membagi pengalaman hidup, menerima keluh kesah, menikmati canda tawa dan semua kenangan ketika menempuh masa studi bersama. Semoga penulis bukanlah benalu dalam hidup kalian;
11. Sahabat-sahabat pena Mas Galih, Lendra, Rakryan, Rokhim, Adelia, Tom, Dyah ayu, dan Aisyah terimakasih sudah selalu menemani dan memotivasi, dan juga kebersamaan selama mengenyam pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
12. Keluarga besar Paguyuban Jong Madura (JongMa), terutama Firman, Ozy dan Wiwid Terimakasih atas support dan dukungan dari kalian semua;
13. Seluruh teman-teman di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebersamaannya;
14. Teman-teman KKN desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, Izam, Adi Darma, Itah, Ria Pertanian, Ria Teknik Sipil, dan Lilik serta

seluruh perangkat dan warga Desa, terimakasih atas kekeluargaan, kebersamaan , dan kerja sama selama KKN berlangsung;

15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Semuga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya.

Jember, 18 Desember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	vi
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	8
2.1.2 Penerimaan Pemerintah	23
2.1.3 Teori Pajak	25

2.1.4 Pajak Daerah	34
2.1.5 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	36
2.1.6 Pengertian Penduduk	38
2.1.7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	44
2.1.8 Hubungan Jumlah Penduduk dan Pajak	47
2.1.9 Hubungan UMKM dan Pajak	47
2.1.10 Hubungan PDRB dan Pajak	48
2.2 Tinjauan Penelitian Sebelumnya.....	48
2.3 Kerangka Konseptual.....	51
2.4 Hipotesis Penelitian.....	54
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN.....	55
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	55
3.2 Spesifikasi Model Penelitian.....	55
3.3 Metode Analisis Data.....	56
3.4 Metode Analisis <i>Ordinary Least square</i> (OLS)	56
3.4.1 Uji f-Statistik (Uji Simultan)	57
3.4.2 Uji t-Statistik (Uji Parsial)	58
3.4.3 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)	59
3.5 Uji Asumsi Klasik.....	60
3.6 Definisi Operasional.....	62
BAB 4. PEMBAHASAN.....	63
4.1 Gambaran Umum	63
4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Jember	63
4.1.2 Kondisi Geografis Kabupaten Banyuwangi	64
4.1.3 Kondisi Geografis Kabupaten Situbondo	65
4.1.4 Kondisi Geografis Kabupaten Bondowoso	66
4.2 Gambaran Umum Variabel Penelitian	66
4.2.1 Penerimaan Pajak Daerah	66
4.2.2 Jumlah Penduduk	69
4.2.3 Jumlah Produk Domestik Bruto (PDRB)	71
4.2.4 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	75

4.3 Hasil Analisis Data.....	77
4.3.1 Hasil Estimasi Metode Regresi Data Panel	77
4.3.2 Hasil Estimasi Penerimaan Pajak	78
4.3 Uji Asumsi Klasik	79
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	83
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Saran.....	84
DAFTAR BACAAN.....	85
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

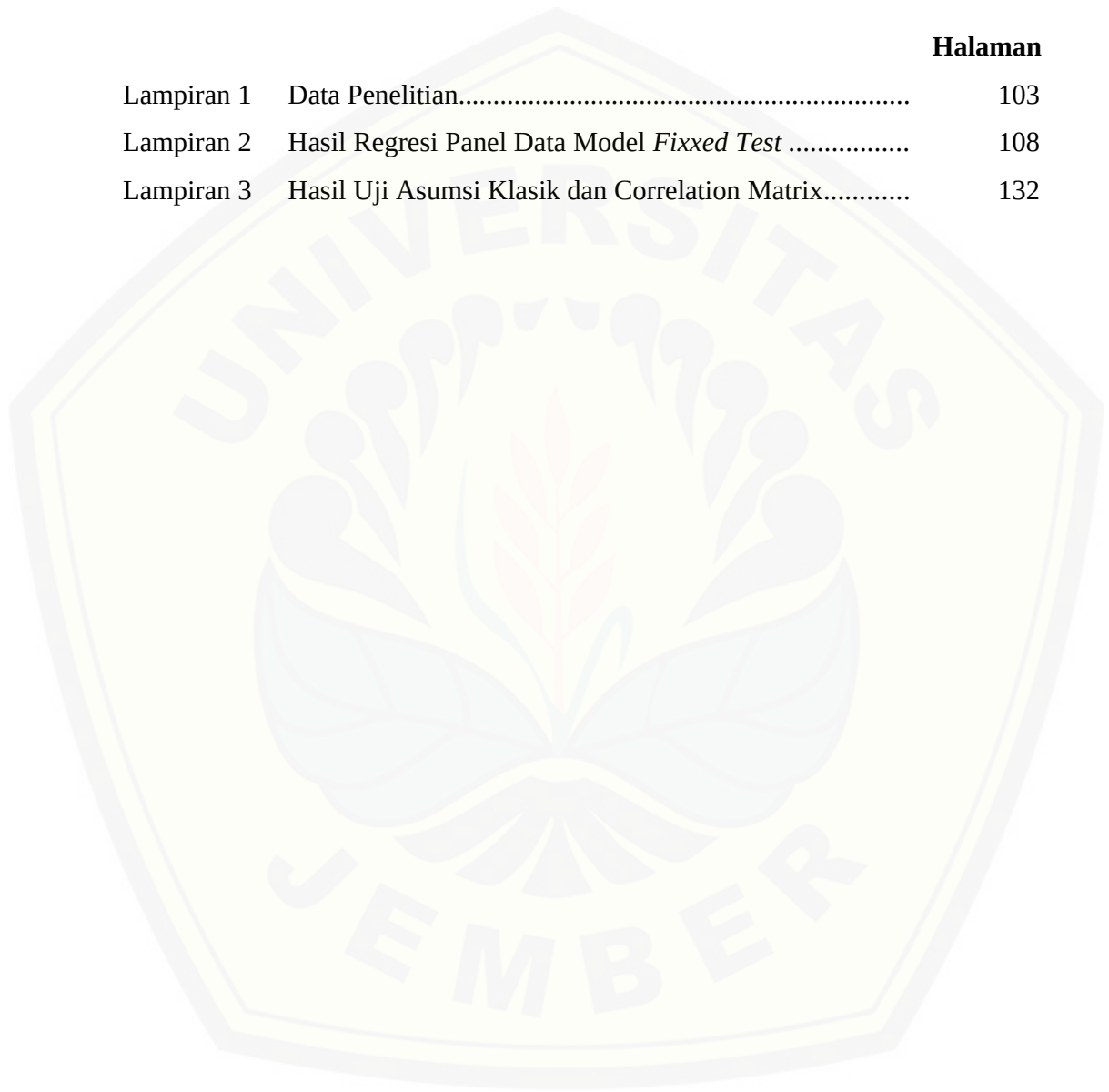
	Halaman
Tabel 2.1 Kriteria UMKM Menurut UU No.20 Tahun 2008 Berdasarkan Asset dan Omset	37
Tabel 2.2 Tinjauan Penelitian Sebelumnya.....	50
Tabel 4.1 Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Karesidenan Basuki Tahun 2010-2014	67
Tabel 4.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Daerah Karesidenan Basuki Tahun 2010-2014	69
Tabel 4.3 Perkembangan Jumlah PDRB Daerah Karesidenan Basuki Tahun 2010-2014.....	72
Tabel 4.4 Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Daerah Karesidenan Basuki Tahun 2010-2014.....	75
Tabel 4.5 Hasil Estimasi Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Karesidenan Basuki dengan Metode Regresi Data Panel Model <i>Fixxed Effect</i>	78
Tabel 4.6 Hasil Uji Diagnosis Asumsi Klasik Kab. Jember	79
Tabel 4.7 Hasil Uji Diagnosis Asumsi Klasik Kab. Situbondo.....	80
Tabel 4.8 Hasil Uji Diagnosis Asumsi Klasik Kab. Bondowoso.....	80
Tabel 4.9 Hasil Uji Diagnosis Asumsi Klasik Kab. Banyuwangi	80

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Grafik Pergerakan Laju Sewa, Upah dan Laba	11
Gambar 2.2 Sistematika Kerangka Konseptual.....	53
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Jember	64
Gambar 4.2 Grafik Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Karesidenan Basuki Tahun 2000-2014.....	67
Gambar 4.3 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Daerah Karesidenan Basuki Tahun 2000-2014.....	70
Gambar 4.4 Grafik Laju pertumbuhan PDRB Daerah Karesidenan Basuki Tahun 2000-2014.....	73
Gambar 4.5 Grafik Laju Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Daerah Karesidenan Basuki Tahun 2000-2014.	76

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Data Penelitian.....	103
Lampiran 2 Hasil Regresi Panel Data Model <i>Fixxed Test</i>	108
Lampiran 3 Hasil Uji Asumsi Klasik dan Correlation Matrix.....	132



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional pada dasarnya merupakan suatu pembangunan yang dilaksanakan disemua aspek kehidupan bangsa yang meliputi politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta aspek pertahanan keamanan. Pembangunan nasional dilaksanakan dengan memiliki tujuan agar rakyat Indonesia mencapai kesejahteraan dan kemakmuran secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental dan kelembagaan, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan (Todaro, 2000).

Pembangunan nasional yang tertuang dalam misi untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, dengan pemahaman bahwa pembangunan ekonomi identik dengan pertumbuhan. Pada awalnya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi hal itu akan di ikuti dengan berbagai masalah, baik itu masalah pengangguran, kemiskinan di pedesaan atau daerah yang masih banyak memiliki kekurangan dari segi apapun, ketimpangan distribusi pendapatan, dan ketidakseimbangan struktural. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi harus dapat di arahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial (Kuncoro, 2004).

Pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana pemerintah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru untuk merangsang perkembangan kegiatan ekonomi daerah. Dalam rangka pencapaian tujuan ekonomi daerah tersebut dibutuhkan

kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah (*endogenous development*), dengan menggunakan potensi sumber daya lokal.



Orientasi ini mengarahkan untuk pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Arsyad, 1999).

Instrumen kebijakan fiskal salah satunya adalah pajak. Perpajakan merupakan primadona komponen yang paling besar di suatu negara dalam menopang pembiayaan dan pembanguan suatu negara tersebut. Pajak selain merupakan sumber dana dari pembiayaan negara, pajak juga merupakan sumber dana penerimaan suatu negara (Rahmanta, 2011). Sementara itu saat ini pajak merupakan sumber pendapatan negara, dimana pajak negara merupakan peran utama sebagai instrumen kebijakan fiskal yang sangat penting dalam pengendalian kebutuhan ekonomi. Peran pajak di samping sebagai penerimaan utama negara, pajak juga mempunyai fungsi sebagai alat mengatur (*Regulator*) dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian. Penerimaan pajak dapat berasal dari pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, maupun pajak-pajak yang lainnya. Selain itu, penerimaan pajak dapat berupa penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional.

Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak paten dari pemerintah di mana pungutan tersebut di dasarkan pada undang-undang dan juga pungutannya dapat di paksakan terhadap objek pajak. Penerimaan pajak negara terdiri dari penerimaan dalam negeri pemerintah dan hibah. Menurut Rahmanta (2011) penerimaan dalam negeri pemerintah terdiri atas; (a) pajak penghasilan, (b) pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penghasilan atas penjualan barang mewah, (c) pajak bumi dan bangunan, (d) pajak lainnya. Peranan penerimaan perpajakan merupakan salah satu sumber penting penerimaan suatu negara akan terus di tingkatkan, dengan ditingkatkannya evaluasi dan kebijakan penyempurnaan. Hal tersebut agar pelaksanaan perpajakan di negara bisa lebih efektif dan efisien dengan perkembangan globalisasi yang menuntun daya saing yang sangat tinggi suatu negara. Dengan seperti itu di harapkan prinsip-prinsip perpajakan yang sehat seperti: persamaan, kesederhanaan dan keadilan dapat tercapai agar tidak berdampak pada peningkatan kapasitas fiskal, melainkan juga terhadap perkembangan kondisi ekonomi makro indonesia.

Otonomi daerah merupakan bentuk sistem penyerahan urusan pemerintahan dan pelimpahan wewenang kepada daerah yang berada di bawahnya. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pheni, C., 2005). Pada tingkat yang terendah, otonomi berarti mengacu pada perwujudan *free will* yang melekat pada diri-diri manusia sebagai satu anugerah paling berharga dari Tuhan (Piliang, 2003). *Free will* inilah yang bisa mendorong manusia untuk mengaktualisasi diri dan menggali potensi yang ada pada dirinya secara maksimal. Dari pengertian tersebut di atas maka akan tampak bahwa daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri yang dalam hal ini sering kita sebut sebagai Desentralisasi.

Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua UU otonomi daerah ini merupakan revisi terhadap UU Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 sehingga kedua Undang-undang tersebut kini tidak berlaku lagi.

Alasan yang mendorong diberlakukannya otonomi daerah adalah tidak meratanya pembangunan di daerah selama ini menyebabkan ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu terdapat campur tangan pemerintah pusat di masa lalu yang mengakibatkan terlambatnya pengembangan yang dimiliki oleh daerah. Kebijakan otonomi daerah merupakan pendelegasian kewenangan yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, dan sumberdaya manusia dalam kerangka desentralisasi fiskal (Situngkir, 2009).

Pelaksanaan dan penerapan otonomi daerah menurut pemerintah kabupaten untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya (Kuncoro, 2004). Hal ini menandakan bahwa daerah harus berusaha untuk mampu meningkatkan pendapatan asli daerah yang merupakan tolak ukur bagi daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Pada prinsipnya

makin besar semakin besar sumbangan PAD terhadap Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

Peningkatan PAD merupakan suatu usaha daerah yang digunakan untuk memperkecil ketergantungan pemerintah daerah atas pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah menjadi bagian keuangan utama bagi pemerintah daerah yang perlu terus ditingkatkan agar penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan lancar sehingga daerah secara bertahap dan berangsur-angsur dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat serta dapat menjadi daerah mandiri yang mampu untuk membiayai pembangunan daerah.

Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang otonomi tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas, fungsi dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian diharapkan masing-masing daerah akan dapat lebih maju, mandiri, sejahtera, dan kompetitif di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya tingkat kesenjangan antar wilayah dan meningkatnya produksi barang dan jasa yang di ukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan. Teori pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah di ukur dengan pertumbuhan PDRB bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu: modal, tenaga kerja, dan teknologi (Sukirno, 2002). PDRB dapat meningkat apabila investasi di daerah tersebut meningkat, investasi akan meningkat jika ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam menunjang pelaksanaan investasi maka dibutuhkan dana untuk membiayai pembangunan yang dipungut dari pajak dan non pajak.

Tercapainya keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah akan dapat meningkatkan sarana dan prasarana daerah tersebut. Jumlah penduduk, UMKM dan PDRB merupakan faktor utama penunjang bagi meningkatnya pendapatan penerimaan pajak daerah. UMKM dan PDRB merupakan sumber utama pendapat penerimaan pajak daerah yang sepenuhnya dapat direncanakan dan direalisasikan oleh pemerintah daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang digunakan daerah untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya baik perbiayaan tersebut di gunakan untuk pembangunan atau hal lain yang bersifat *usefull* bagi daerah pada umumnya dan bagi masyarakat pada khususnya. Pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah yang bersumber dari jumlah penduduk, UMKM dan PDRB agar dapat membiayai pembangunan.

Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001 Jawa timur. Terutama daerah Jawa Timur bagian timur yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo yang memasuki paradigma baru dalam sistem pemerintahan yaitu sitem sentralisasi ke sistem desentralisasi atau otonomi daerah, dengan melaksanakan 11 kewenangan wajib otonomi sehingga memberikan keleluasaan penuh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai keinginan dan aspirasi rakyatnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Misi utama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebelas bidang pemerintahan wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah otonom adalah pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi, serta tenaga kerja. Pemerintah daerah dapat merinci bidang pemerintahan wajib tersebut menjadi kewenangan daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah untuk pembiayaannya serta sumber daya manusia yang tersedia. Kemampuan daerah Kabupaten Jember dalam hal pembiayaan dalam pengurusan rumah tangganya sendiri di era otonomi daerah, tentunya memperhatikan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya penerimaan anggaran sebagaipenunjang pelaksanaan otonomi daerah.

Keberhasilan otonomi daerah untuk menunjang pembangunan daerah juga dapat dilihat dari besarnya jumlah penduduk, jumlah Produk Regional Domestik Bruto (PDRB), Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan meningkatnya penerimaan pajak daerah, maka akan memperbaiki struktur pembiayaan daerah dan memperkecil biaya tranfer dana dari pemerintah pusat atau pinjaman luar negeri. Untuk lebih meningkatkan kemandirian dalam membiayai kegiatan daerah, maka akan terus di tingkatkan penerimaan pajak daerah melalui upaya mengefisiensikan pemungutannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang di gunakan sebagai pembangunan di era otonomi daerah sudah sewajarnya menjadikan penerimaan pajak daerah sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di ambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah Karesidenan Basuki?
2. Bagaimana pengaruh Jumlah UMKM terhadap Penerimaan Pajak Daerah Karesidenan Basuki?
3. Bagaimana pengaruh Jumlah PDRB terhadap Penerimaan Pajak Daerah Karesidenan Basuki?
4. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk, UMKM, PDRB terhadap Penerimaan Pajak Daerah Karesidenan Basuki?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah Karesidenan Basuki.
2. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah UMKM terhadap Penerimaan pajak Daerah Karesidenan Basuki.
3. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah PDRB terhadap Penerimaan Pajak Daerah Karesidenan Basuki.

4. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk, UMKM, PDRB terhadap Penerimaan Pajak Daerah Karesidenan Basuki.

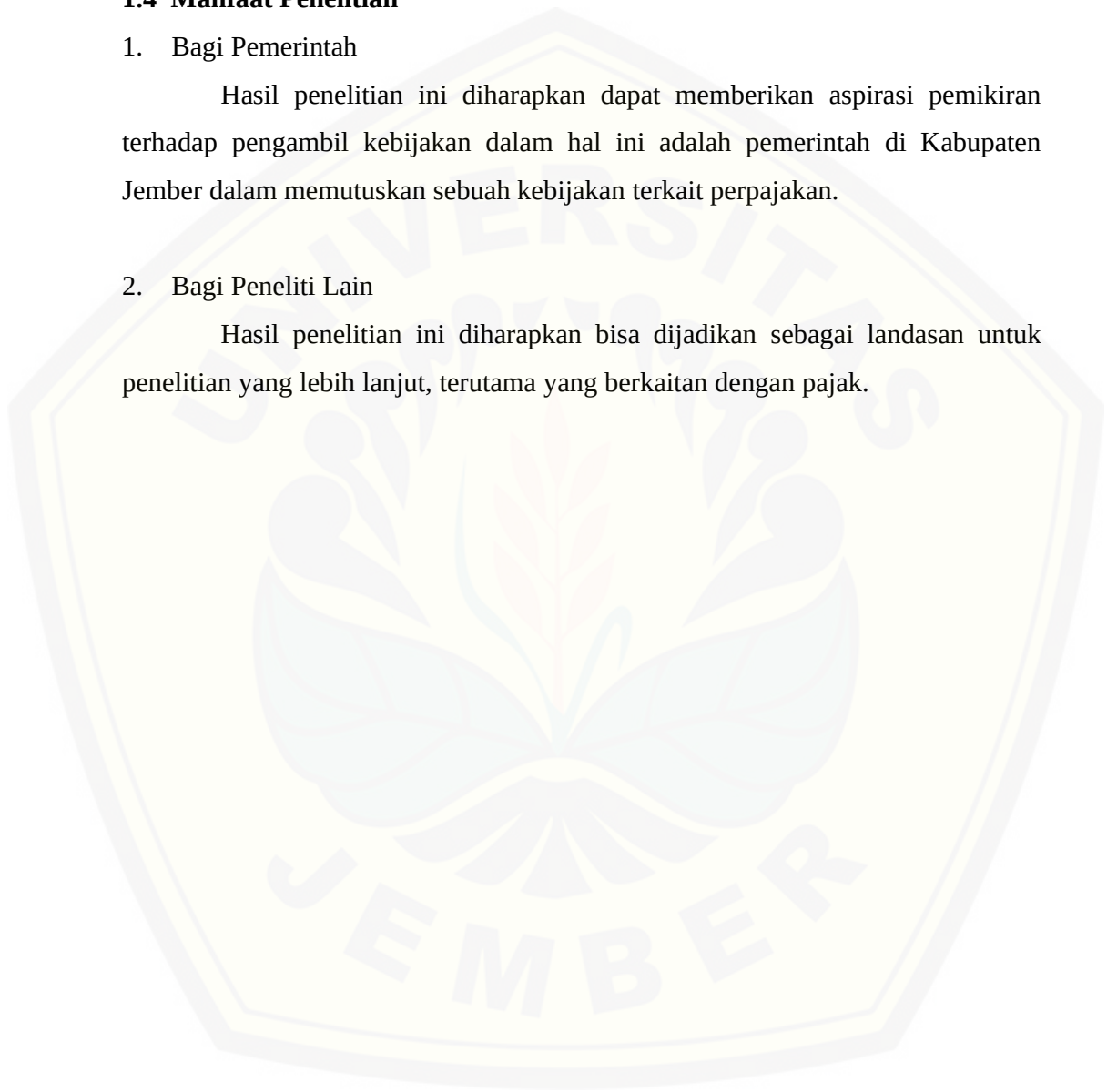
1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan aspirasi pemikiran terhadap pengambil kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah di Kabupaten Jember dalam memutuskan sebuah kebijakan terkait perpajakan.

2. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai landasan untuk penelitian yang lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan pajak.



BAB 2. TINJAUAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Irawan dan Suparmoko (2002) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu perekonomian. Menurut Adam Smith ada tiga fungsi utama pemerintah dalam mendukung perekonomian yaitu (1) memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan; (2) menyelenggarakan peradilan; (3) menyediakan barang-barang yang tidak di sediakan oleh pihak swasta. Menurut Todaro (2004) yaitu ada tiga komponen utama penentu pertumbuhan ekonomi, yaitu: (a) akumulasi modal yang meliputi semua bentuk; (b) pertumbuhan penduduk yang meningkat jumlah angkatan kerja di tahun-tahun mendatang; (c) kemajuan teknologi. Sedangkan menurut Kuznet pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jumlah angka dalam jangka panjang untuk menunjang segala bentuk pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan yang telah di rencanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan utama yaitu pembangunan yang berupa pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka pengangguran, dan pengendalian terhadap inflasi.

Dalam garis besarnya teori-teori pertumbuhan ekonomi dapat di golongkan menjadi lima golongan besar yaitu Aliran Klasik, Karl Marx, Scumpeter, Neo-Klasik dan Post Keynesian. Aliran-aliran ini mencoba menemukan sebab-sebab pertumbuhan pendapatan nasional dan proses pertumbuhannya.

1. Aliran Klasik

Aliran klasik muncul pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, yaitu di masa Revolusi Industri, dimana suasana waktu itu merupakan awal bagi adanya perkembangan ekonomi. Pada waktu itu sistem liberal sedang merajalela dan menurut aliran Klasik pertumbuhan ekonomi liberal itu di sebabkan oleh adanya pacuan antara kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk.

Mula-mula kemajuan teknologi lebih cepat dari pertumbuhan jumlah penduduk, seperti akhirnya terjadi sebaliknya dan mengalami kemacetan (Irawan dan Suparmoko, 2002).

Kemajuan teknologi mula-mula disebabkan oleh adanya akumulasi kapital atau dengan kata lain kemajuan teknologi tergantung pada pembentukan kapital. Dengan adanya akumulasi kapital akan memungkinkan dilaksanakannya spesialisasi atau pembagian kerja melalui mekanisasi yang lebih baik sehingga produktivitas tenaga kerja dapat bertambah. Kecepatan pembentukan kapital tergantung pada tinggi rendahnya tingkat keuntungan. Sedangkan tingkat keuntungan ini akan menurun setelah berlakunya hukum tambahan hasil yang semakin berkurang (*law of diminishing returns*), karena sumber-sumber daya alam itu terbatas adanya.

Meningkatnya tingkat keuntungan akan mendorong perkembangan investasi, dan investasi (pembentukan kapital) akan menambah volume persediaan kapital (*capital capital*) akan menambah volume persediaan kapital (*capital stock*). Keadaan ini akan memajukan tingkat teknologi dan memperbesar jumlah uang yang beredar sehingga tingkat upah dapat naik dan selanjutnya kenaikan tingkat upah ini berarti meningkatnya kemakmuran penduduk. Tingkat tambahnya jumlah penduduk ini menyebabkan berlakunya hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang. Selanjutnya, berlakunya hukum tersebut akan berakibat menurunnya tingkat keuntungan dan turunnya tingkat keuntungan akan menurunkan akumulasi kapital kembali.

a. *Adam Smith*

Manurut Adam Smith dalam Irawan dan Suparmuko (2002), untuk berlangsungnya perkembangan ekonomi di perlukan adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja bertambah. Spesialisasi dalam proses produksi akan dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dapat mendorong ditemukannya alat-alat atau mesin-mesin baru dan akhirnya dapat mempercepat dan meningkatkan produksi. Dinyatakan bahwa sebelum adanya pembagian kerja harus ada akumulasi kapital terlebih dahulu dan akumulasi kapital ini berasal dari dana tabungan. Disamping itu Smith juga menitik beratkan

pada “luas pasar”. Pasar harus seluas mungkin agar dapat menampung hasil produksi, sehingga perdagangan internasional itu menambah luasnya pasar. Jadi pasar terdiri dari pasar dalam negeri dan pasar luar negeri.

Menurut Smith, sekali pertumbuhan itu mulai maka ia akan bersifat komulatif, artinya bila ada pasar yang cukup dan ini akan menaikkan tingkat produktivitas tenaga kerja. Kenaikan produktivitas ini akan menaikkan penghasilan nasional dan selanjutnya juga memperbesar jumlah penduduk. Penduduk tidak saja merupakan pasar karena pendapatannya naik, tetapi pendapatan yang lebih besar itu juga akan merupakan sumber tabungan. Jadi spesialisasi yang semakin besar membutuhkan pasar yang semakin luas dan dorongan untuk membuat alat-alat baru makin bertambah. Di lain pihak naiknya produktivitas akan mengakibatkan tingkat upah naik dan ada akumulasi kapital. Tetapi karena sumberdaya alam terbatas adanya, maka keuntungan akan menurun karena berlakunya hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang. Pada tingkat inilah perkembangan mengalami kemacetan atau berhenti.

b. David Ricardo

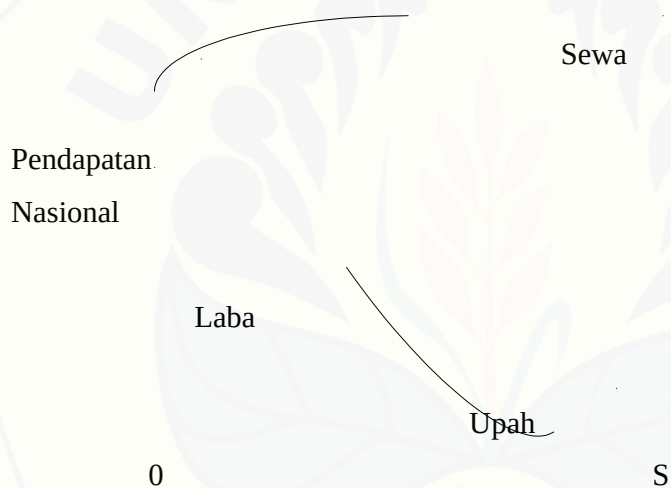
Menurut David Ricardo dalam Irawan dan Suparmoko (2002), di dalam masyarakat ekonomi ada tiga golongan masyarakat yaitu golongan kapitalis, golongan buruh dan golongan tuan rumah. Golongan kapitalis adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatannya dalam bentuk akumulasi kapital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional. Untuk golongan buruh, di katakan bahwa golongan-golongan ini tergantung pada golongan kapitalis dan merupakan golongan terbesar dalam masyarakat. Adapun golongan tuan tanah, mereka hanya menerima sewa saja dari golongan kapitalis atas areal tanah yang di sewakan.

Menurut David Ricardo bila jumlah penduduk bertambah terus dan akumulasi kapital terus menerus terjadi, maka tanah yang subur menjadi kurang jumlahnya atau semakin langka adanya. Akibatnya berlaku pula hukum tambahan hasil yang semakin berkurang. Di samping itu juga ada persaingan di antara kapitalis-kapitalis itu sendiri dalam mengolah tanah yang semakin kurang

kesuburannya dan akibatnya keuntungan mereka semakin menurun hingga sampai pada tingkat keuntungan yang normal saja.

Dalam hal pendapatan nasional, tampak bahwa bagian upah dan sewa meningkat terus, sedangkan laba menurun dengan semakin berkembangnya waktu. Terlihat jelas pada gambar 2.1 tentang grafik pergerakan laju sewa, upah, dan laba.

Gambar 2.1 Grafik Pergerakan Laju Sewa, Upah, dan Laba



c. Thomas Robert Maltus

Menurut Maltus dalam Irawan dan Suparmoko (2002), kenaikan jumlah penduduk yang terus-menerus merupakan unsur yang perlu untuk adanya tambahan permintaan. Tetapi kenaikan jumlah penduduk saja tanpa di barengi dengan kemajuan faktor-faktor atau unsur-unsur perkembangan yang lain sudah tentu tidak akan menaikkan pendapatan dan tidak akan menaikkan permintaan. Dengan demikian tumbuhnya jumlah penduduk saja justru akan menurunkan tingkah upah dan berarti pula memperendah biaya produksi. Turunnya biaya produksi akan memperbesar keuntungan-keuntungan para kapitalis dan mendorong mereka untuk terus memproduksi, tetapi keadaan ini hanya sementara

saja sifatnya, sebab permintaan efektif (*effective demand*) akan semakin berkurang karena pendapatan buruh juga semakin berkurang.

Jadi kenaikan jumlah penduduk saja bukan merupakan pendorong kemajuan ekonomi bilamana ia tidak membawa kenaikan permintaan relatif. Lagi pula perkembangan penduduk, walaupun juga menambah permintaan efektif, belum tentu membawa perkembangan ekonomi.

2. Teori Karl Marx

a. Sejarah perkembangan masyarakat

Karl Marx dalam Irawan dan Suparmuko (2002), mengemukakan teorinya berdasar atas sejarah perkembangan masyarakat di masa perkembangan itu melalui 5 tahap:

1) Masyarakat komulatif primitif (*primitive communal*)

Dalam tahap ini masyarakat masih menggunakan alat-alat untuk bekerja yang sifatnya masih sangat sederhana. Alat-alat sederhana itu bukan milik persorangan akan milik komunal (milik bersama). Dalam masyarakat ini tidak ada surplus produksi di atas konsumsi karena orang membuat sendiri barang-barang atas kebutuhannya sendiri. Tetapi makin lama semakin sedikit demi sedikit mengetahui alat-alat produksi yang lebih baik.

2) Masyarakat perbudakan (*slavery*)

Hubungan produksi antara orang-orang yang memiliki alat-alat produksi dengan orang-orang yang hanya bekerja untuk mereka merupakan dasar terbentuknya masyarakat perbudakan. Dengan cara seperti ini keuntungan para pemilik alat produksi semakin besar karena budak-budak hanya di beri sekedar nafkah supaya dapat bekerja dan tidak mati.

3) Masyarakat feodal

Karena adanya pertentangan-pertentangan dalam masyarakat maka berahirlah sistem perbudakan dan terbentuklah suatu masyarakat baru yaitu masyarakat feodal, dimana bangsawan memiliki alat-alat produksi yang paling yaitu tanah. Para petani kebanyakan terdiri dari bekas budak yang terbebaskan. Mereka mengerjakan tanah untuk kaum feodal dan setelah itu baru tanah miliknya

sendiri dapat di kerjakan. Hubungan produksi semacam ini mendorong adanya perbaikan alat-alat produksi terutama di sektor pertanian. Alat-alat pertanian mengalami perbaikan-perbaikan agar para petani mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Perbaikan-perbaikan alat dan cara produksi dalam sistem feodal ini mengubah cara-cara kehidupan sosial. Dengan demikian ada dua golongan kelas yaitu; kelas feodal yang terdiri dari tuan-tuan tanah yang lebih berkuasa dalam hubungan sosial itu, dan kelas buruh yang bertugas melayani mereka.

4) Masyarakat kapitalis

Seperti diketahui masyarakat di kehendaki kebebasan ekonomi. Hubungan produksi dalam sistem kapitalis di dasarkan pada pemilikan individu masing-masing kapitalis terhadap alat-alat produksi. Kelas kapitalis memperkerjakan kelas buruh yang mau tidak mau menjual tenaganya karena mereka tidak memiliki alat produksi. Hubungan produksi semacam ini memungkinkan perkembanganyang pesat akan alat-alat produksi karena adanya keuntungan yang besar. Produksi mesin-mesin di perluas dengan menggunakan tenaga uap, tenaga listrik dan sebagainya. Spesialisasi tidak saja dalam pekerjaan tetapi juga di antara kegiatan. Hal ini akan menciptakan pasaran dunia. Perubahan-perubahan dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

5) Masyarakat sosialis

Dalam sistem sosialis, pemilikan alat-alat produksi di dasarkan atas milik sosial. Hubungan produksi merupakan hubungan kerja sama dan saling membantu di antara buruh yang bebas dari unsur eksploitasi. Berbeda dengan masyarakat *primitive communal*, alat-alat produksi dalam masyarakat sosialis terjadi berdasar atas hasil dari kebudayaan manusia yang telah tinggi. Sistem ini memberi kesempatan kepada manusia untuk maju baik dilapangan produksi maupun dalam kehidupan kemasyarakatan. Dalam sistem sosialis tidak ada lagi kelas-kelas masyarakat.

b. Runtuhnya sistem kapitalis

Uraian di atas menunjukkan perkembangan masyarakat menurut Karl Marx, dimana dapat di lihat pentingnya perubahan teknologi dan hubungan produksi dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat. Mengenai perkembangan

sistem kapitalis, Karl Marx bersifat pesimis, karena kapitalisme tidak saja akan mengalami stagnasi tetapi juga akan mengalami keruntuhan yang disebabkan oleh perkembangan kapitalisme itu sendiri (Irawan dan Suparmoko, 2002). Karl Marx mengemukakan atau mendasarkan pendapatannya atas adanya hukum gerak, yaitu: Konsentrasi, Akumulasi, Kesengsaraan (*Verelendung*) dan krisis.

1) Konsentrasi

Dalam masyarakat kapitalis dimana persaingan bebas menjadi cara bekerja di situ, maka sudah tentu perusahaan-perusahaan yang kuat yang dapat bertahan dan perusahaan yang kecil akan bangkrut.

2) Akumulasi

Perusahaan-perusahaan yang sudah menggabung akan bertambah besar karena sedikit banyak perusahaan yang sudah besar itu memiliki kedudukan monopoli, sehingga kekayaannya semakin menumpuk (*berakumulasi*). Perbedaan antara si kaya dan si miskin menjadi semakin besar.

3) Kesengsaraan

Adanya persaingan tersebut di atas berarti bahwa perusahaan yang kecil menjadi bubar dan mereka menggabungkan diri pada para buruh. Buruh menjadi semakin banyak jumlahnya dan semakin kuat pula. Karena penawaran atau jumlah buruh semakin banyak, maka dapat dikatakan dan mereka ini masih dapat didesak oleh kaum kapitalis. Akibatnya kemelaratan menjadi semakin meluas.

4) Krisis

Produksi semakin besar jumlahnya karena keuntungan selalu bertambah sebagai akibat dari biaya tenaga kerja yang dapat ditekan. Tetapi hal ini tidak dapat bertahan lama. Daya beli masyarakat makin berkurang karena pendapatan buruh semakin berkurang, sehingga terjadilah kelebihan produksi atas konsumsi (*Over Production*). Harga barang-barang merosot dan produksi terpaksa ditahan. Pabrik-pabrik banyak yang ditutup dan terjadilah krisis. Demikianlah gambaran runtuhnya kapitalisme menurut Karl Marx. Pada pokoknya kapitalis akan mendorong:

- i. Makin sengsaranya kaum buruh;
- ii. Terjadinya konsentrasi kapital;

iii. Turunnya tingkat keuntungan kaum kapitalis.

3. Aliran Neo-Klasik

Kurang lebih pada tahun 1870-an ada pergeseran dalam aliran ekonomi, dimana aliran ekonomi yang baru ini menggantikan aliran ekonomi Klasik. Alasan adanya pergerakan ini di samping pada waktu itu tampak pentingnya kemajuan teknologi dan adanya penemuan sumber-sumber produksi baru, juga ada kemungkinan-kemungkinan untuk perkembangan lebih lanjut di bawah kemajuan teknologi. Aliran baru ini disebut dengan aliran Neo-Klasik.

Pendapat Neo-Klasik dalam Irawan dan Suparmoko (2002), mengenai perkembangan ekonomi dapat di ikhtisarkan sebagai lberikut:

- a) Adanya akumulasi kapital merupakan faktor penting dalam perkembangan ekonomi. Menurut Neo-Klasik, tingkat bunga dan tingkat pendapatan menentukan tingginya tingkat tabungan. Pada suatu tingkat teknik tertentu, tingkat bunga juga menentukan tingginya tingkat investasi. Jika tingkat bunga rendah, maka investasi akan tinggi dan sebaliknya.
- b) Perkembangan itu merupakan proses yang gradual. Perkembangan merupakan proses yang gradual dan terus-menerus. Mengenai hal ini tokoh Neo-Klasik Alfred Marshall menganggap bahwa perekonomian sebagai suatu kehidupan organik yang tumbuh dan berkembang perlahan-lahan sebagai proses yang gradual. Kemudian, bagaimana dengan adanya inovasi teknologi yang hebat pada abad ke-18 dan 19.
- c) Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan komulatif. Yang dimaksud dengan perkembangan sebagai proses yang harmonis dan komulatif ialah bahwa proses ini meliputi sebagai faktor dimana faktor-faktor itu tumbuh bersama-sama. Kenaikan pendapatan Marshall menggambarkan pola harmonisnya perkembangan itu karena adanya *internal economies* dan *external economies*. *Internal economies* timbul karena adanya kenaikan skala produksi yang tergantung pada sumber-sumber dan efisiensi dari pengusaha itu sendiri. Sedangkan *external economies* tergantung pada perkembangan industri pada umumnya yang

menyediakan kebutuhan-kebutuhan antar industri itu sendiri. *Internal economies* merupakan hasil dari adanya mesin-mesin yang lebih luas, manajemen yang lebih baik dan sebagainya. *External economies* timbul karena adanya kenaikan produksi pada umumnya dan hubungannya dengan perkembangan pengetahuan dan kebudayaan.

- d) Aliran Neo-Klasik merasa optimis terhadap perkembangan ekonomi. Kaum klasik mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan macet karena terbatasnya sumber daya alam. Di pihak lain, kaum Neo-Klasik berpendapat dan meyakini bahwa ada kemampuan manusia untuk mengatasi terbatasnya pertumbuhan itu. Kemajuan-kemajuan teknologi dan perbaikan-perbaikan dalam kualitas buruh cenderung menciptakan pendapatan yang baik.
- e) Adanya perkembangan internasional dalam perkembangan tersebut. Adanya pasar yang luas, produksi dapat dilaksanakan secara besar-besaran, spesialisasi dapat lebih mendalam dan produktivitas naik, penghasilan pun naik dan seterusnya.

4. Teori Schumpeter

a. Jalannya perkembangan ekonomi

Menurut Joseph Schumpeter perkembangan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis ataupun gradual, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan terputus-putus, yaitu merupakan gangguan-gangguan terhadap keseimbangan yang telah ada (Irawan dan Suparmoko, 2002). Perubahan yang spontan yang terputus-putus dalam saluran perdagangan dan gangguan-gangguan dalam keseimbangan itu tampak pada kehidupan industri dan perdagangan, dan bukannya tampak dalam permintaan konsumen akan barang-barang akhir. Yang di artikan dengan inovasi dapat berbentuk lima hal, yaitu:

- 1) Mengemukakan atau mengenalkan barang-barang baru, atau barang-barang yang berkualitas baru yang belum dikenal oleh konsumen.
- 2) Mengenalkan suatu metode produksi yang baru.
- 3) Pembudakan pasar baru bagi perusahaan.

- 4) Penemuan sumber-sumber ekonomi baru.
 - 5) Menjalankan organisasi baru dalam industri.
- b. Runtuhnya sistem kapitalis

Dengan anggapan seperti tersebut di atas Schumpeter berpandangan bahwa dasar-dasar ekonomi dan sosial sistem kapitalis itu akan runtuh. Ia mendasarkan pendapatnya itu atas tiga hal:

- a) Usangnya fungsi wiraswasta.
- b) Runtuhnya rangka kehidupan kapitalis.
- c) Runtuhnya golongan-golongan politisi.

5. Teori Keynes

The General Theory of Employment, interest, and Money adalah karya tulis Keynes yang paling terkenal. Buku ini ditulis sebagai reaksi terhadap depresi besar-besaran yang terjadi tahun 1930-an yang tidak berhasil dipecahkan dengan metode klasik dan neo-klasik. Dalam bukunya, Keynes menerangkan bahwa pemerintah harus melakukan campur tangan dalam mengendalikan perekonomian nasional dengan kebijakan-kebijakan secara aktif sehingga mempengaruhi gerak perekonomian.

Pandangan-pandangan Keynes terus diperbaharui dan dikembangkan oleh pendukung-pendukungnya, baik dari golongan Neo-Keynesian maupun Post-Keynesian. Penerus ajaran Keynes banyak berjasa dalam mengembangkan teori-teori yang berhubungan dengan usaha menjaga stabilitas perekonomian. Teori-teori tersebut menerangkan dan mengantisipasi fluktuasi ekonomi (*bussines cycle*) dan teori-teori yang berhubungan dengan pertumbuhan dan pendapatan.

Aliran ini juga mencoba mencari solusi atas kegagalan dari ekonomi liberal yang mengusung asas *laissez-faire* yang beranggapan pasar dan sektor swasta akan mencapai optimal tanpa campur tangan pemerintah. Pandangan-pandangan mereka disebut Keynesian karena teori-teori mereka diturunkan dari teori determinasi pendapat Keynes. Aliran Keynesian pada masanya menekankan pembahasan tentang teori fluktuasi ekonomi, menganalisis hal-hal yang dapat menyebabkan perekonomian menjauh dari posisi keseimbangan sehingga tidak

stabil, dan yang lebih penting adalah apa tindakan dan kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencegah gerak perekonomian yang berfluktuasi tersebut agar menjadi lebih stabil, serta peduli terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan pada masa pemikiran aliran Klasik, masalah fluktuasi ekonomi hanya dibicarakan selintas saja hal ini dikarenakan sudah begitu melekatnya kepercayaan orang pada pendapat Klasik yang mengatakan bahwa perekonomian akan selalu menuju pada suatu keseimbangan.

a. Teori Fluktuasi Ekonomi

Pada masa sebelumnya masalah fluktuasi atau siklus ekonomi telah dibicarakan oleh Ricardo dan Stuart Mill. Namun, pembahasannya hanya dilakukan secara selintas. Bagi kaum Keynesian fluktuasi ekonomi terjadi karena dua penyebab yaitu; *Pertama*, terjadinya perubahan-perubahan dalam tingkat investasi dan rendahnya tingkat konsumsi. Sebagai contoh, depresi besar-besaran pada tahun 1930-an terjadi karena naik turunnya jumlah investasi dan pengeluaran konsumsi.

Perubahan tingkat bunga akan mempengaruhi investasi dan pendapatan. Misalnya, terjadi kenaikan *moneysupply* dan kurangnya *money demand* maka tingkat bunga akan menurun, investasi dan pendapatan akan meningkat. Meningkatnya pendapatan akan mempengaruhi meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat. Namun, apabila terjadi kenaikan *money demand* melebihi *money supply*, maka tingkat bunga akan meningkat, yang akan berdampak pada tingkat investasi dan pendapatan.

Kedua, fluktuasi terjadi karena tidak adanya mekanisme koreksi yang mampu mendorong perekonomian pada keseimbangan kesempatan kerja penuh, yang disebabkan oleh kakunya harga-harga terutama tingkat upah dalam mekanisme penyesuaian. Ketidakseimbangan perekonomian yang berkaitan dengan pengangguran dan inflasi menyebabkan kaum Keynesian percaya perlunya intervensi dari pemerintah sebagai langkah koreksi.

Berbedea dengan aliran Sisi Penawaran, menurutnya lebih baik meningkatkan pendapatan nasional melalui pemanfaatan sumber daya penuh, daripada mencoba menekan atau meredakan fluktuasi ekonomi. Dalam mengatasi

inflasi dan pengangguran, jalur yang ditempuh oleh aliran sisi penawaran melalui program penurunan pajak kepada pengusaha. Alasannya turunnya pajak akan menambah gairah pengusaha dan investasi, yang akan mendorong peningkatan dalam produksi. Dengan meningkatnya produksi, kebutuhan akan tenaga kerja meningkat dan masalah pengangguran dapat diatasi, dan sekaligus inflasi dapat diredakan.

Sedangkan Keynesian melihat perekonomian dari sisi permintaan, menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian, terutama dalam perekonomian yang sedang lesu. Ia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro, untuk mengurangi pengangguran dan deflasi. Jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, uang yang beredar di masyarakat akan bertambah sehingga masyarakat akan terdorong untuk berbelanja dan meningkatkan permintaannya (sehingga permintaan agregat bertambah). Selain itu, tabungan juga akan meningkat sehingga dapat digunakan sebagai modal investasi, dan kondisi perekonomian akan kembali ke tingkat normal.

b. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan

Perhatian terhadap pertumbuhan dan pembangunan terutama di Negara-negara berkembang semakin marak berkat pengaruh ajaran Keynes yang menginginkan campur tangan pemerintah dalam proses pembangunan. Bermodalkan teori-teori dan konsep-konsep yang digagas Keynes, banyak negara berkembang ikut aktif terlibat dalam proses pembangunan.

Sebagaimana diketahui negara berkembang ingin cepat-cepat mengejar ketertinggalannya dari negara-negara maju. Salah satu jalan pintas yang dapat ditempuh adalah memacu pertumbuhan ekonomi dengan melaksanakan industrialisasi. Karena industrialisasi diperlukan dana yang tidak sedikit, banyak negara berkembang meminjam modal dari negara-negara maju, beserta asistensi teknis untuk menyelenggarakan pembangunan. Dengan bantuan dana dan tenaga teknis negara-negara berkembang mulai memperbaiki keadaan ekonominya.

c. Kebijakan Fiskal vs Kebijakan Moneter

Keynesian menganggap kebijakan moneter kurang efektif dalam usaha menstabilkan perekonomian. Karena kebijakan moneter diarahkan hanya untuk pengendalian inflasi dan tidak bisa dipergunakan untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi riil. Sebaliknya, mereka percaya kebijakan fiskal lebih ampuh dalam menstabilkan perekonomian.

Bagi Keynes, campur tangan pemerintah merupakan keharusan. Misalnya, kalau terjadi pengangguran pemerintah bisa memperbesar pengeluarannya untuk proyek-proyek padat karya. Dengan demikian sebagian tenaga kerja yang menganggur bisa bekerja, yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sementara itu, menurut kaum moneteris terjadinya inflasi dipersepsikan karena pengeluaran agregat terlalu besar. Maka, untuk membrantas inflasi tersebut pemerintah perlu mengurangi jumlah uang beredar dan inflasi akan turun dengan sendirinya.

6. Analisis Post Keynesian

Ahli-ahli Post-Keynesian ialah mereka yang mencoba untuk merumuskan perluasan teori Keynesian. Teori Keynesian itu terbatas pada analisis jangka pendek. Untuk analisisnya Keynes menggunakan anggapan-anggapan berdasar atas keadaan waktu sekarang (Irawan dan Suparmoko, 2002). Dalam analisis ini persoalan yang penting adalah: pertama, syarat-syarat apakah yang diperlukan untuk mempertahankan perkembangan pendapatan yang mantap (*steady growth*) pada tingkat kesempatan kerja penuh (*full employment income*) tanpa mengalami deflasi ataupun inflasi. Kedua, apakah pendapatan itu benar-benar bertambah pada tingkat sedemikian rupa sehingga dapat mencegah terjadinya kemacetan yang lama atau inflasi terus-menerus.

a. Analisis Harrod dan Domar mengenai pertumbuhan yang mantap (*steady growth*)

Analisisnya berpusat pada penentuan keadaan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan pendapatan riil yang terus-menerus tanpa ada gangguan apapun. Meskipun detailnya kedua orang ini berbeda-beda dalam analisisnya. Harrod dan

Domar menekankan pentingnya peranan akumulasi kapital dalam proses pertumbuhan. Bedanya adalah Harrod dan Domar menitik beratkan bahwa akumulasi kapital (investasi) itu mempunyai peranan ganda, yaitu menimbulkan pendapatan dan disamping itu juga menaikkan kapasitas produksi dengan cara memperbesar jumlah kapital (Irawan dan Suparmoko, 2002).

b. Teori Evsey D. Domar

Karena investasi menaikkan kapasitas produksi dan juga menaikkan pendapatan, maka berapa seharusnya tingkat kenaikan investasi dipertahankan agar supaya kenaikan pendapatan sama dengan kenaikan kapasitas produksi, sehingga pengerjaan penuh dapat dipertahankan (Irawan dan Suparmoko, 2002).

Anggapan-anggapan yang dipakai untuk teorinya ialah:

- 1) Bahwa perekonomian sudah ada dalam tingkat pengerjaan penuh (*full employment income*);
- 2) Tidak ada pemerintah dan perdagangan luar negeri;
- 3) Tidak ada keterlambatan penyesuaian (*lag of adjustment*) atau dengan kata lain ada penyesuaian yang cepat;
- 4) Hasrat menabung marginal (*marginal propensity to save*) dan hasrat menabung rata-rata (*average propensity to save*) sama;
- 5) *Marginal propensity to save* dan *Capital coefficient* (perbandingan antara kapital dan output) adalah tetap.

c. Teori Harrod

Harrod juga menyelidiki keadaan-keadaan untuk perkembangan ekonomi yang terus-menerus, dan menunjukkan cara yang mungkin dapat ditempuh untuk mencapai perkembangan ekonomi itu. Ia memulai dengan mengatakan bahwa tabungan sama dengan investasi (Irawan dan Suparmoko, 2002)

d. stagnasi sekular (*Secular Stagnations*)

Meskipun alasannya berbeda-beda, tetapi klasik (Ricardo), Marx, Schumpeter, Domar dan Harrod mengatakan bahwa dalam perekonomian kapasitas itu nantinya akan menuju pada pengangguran (*underemployment*) yang kronis. Stagnasi sekular menunjukkan suatu fase perkembangan kapasitas yang telah masak dimana tabungan bersih pada pengerjaan penuh (*full employment*)

cenderung bertambah, sedangkan investasi bersih pada pengerjaan penuh cenderung turun. Ini menunjukkan suatu kecenderungan jangka panjang yang menuju pada pengurangan kegiatan ekonomi. Meskipun gelombang konjungtur masih tetap ada, tetapi masa-masa makmur itu lebih lemah dan lebih pendek daripada masa-masa lesu yang lebih dalam dan lebih lama. Jadi, dalam jangka panjang perekonomian mengalami tekanan yang kronis (Irawan dan Suparmuko, 2002).

1) Peranan Faktor Eksogen

Tokoh stagnasi yang menonjol dalam hal faktor-faktor eksogen adalah A. Hansen. Menurut pendapatnya, perkembangan penduduk yang cepat, pembukaan daerah baru dan kemajuan teknologi akan mendorong investasi dan menekan pendapatan. Sebaliknya pendapatan akan berkurang dan pengangguran akan terjadi, bila tidak ada perkembangan penduduk dan tidak ada penemuan daerah baru.

Sebaliknya menurut Klasik perkembangan penduduk akan menghambat perkembangan ekonomi. Sedangkan menurut Keynes perkembangan penduduk akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Keynes juga mengakui bahwa kenaikan jumlah penduduk saja tidak akan mendorong pertumbuhan, tetapi yang penting ialah kenaikan daya beli masyarakat karena kenaikan jumlah yang miskin tidak akan memperluas pasar. Asumsinya ialah bahwa adanya perkembangan teknologi yang cukup untuk menaikkan produktivitas tenaga kerja dan bahwa permintaan akan tenaga kerja sebanding dengan naiknya jumlah penduduk. Bila pertumbuhan penduduk agak lambat, maka dorongan untuk investasi akan berkurang dan permintaan agregatif (*Agregat Demand*) akan turun. Bila penduduk bertambah dengan cepat, maka kebutuhan akan perumahan dan publik utilities akan terasa sekali. Bila penduduk menurun jumlahnya, investasi dalam bidang tersebut akan terhenti atau berkurang.

Karena itu kemajuan teknologi, penemuan sumber-sumber alam dan daerah-daerah baru serta perkembangan penduduk merupakan pendorong perkembangan ekonomi. Kalau tidak, maka kesempatan investasi tidak cukup untuk menaikkan pendapatan ke arah pendapatan pada tingkat pengerjaan penuh.

Perekonomian di situ akan mengalami pengangguran yang semakin besar segera setelah laju pertumbuhan turun.

2) Perubahan-perubahan dalam lembaga-lembaga sosial

Dalam hal ini patut di ingat bahwa pendapat Schumpeter, bahwa perkembangan itu nantinya akan sampai pada batasnya, karena inovasi berubah menjadi pekerjaan rutin, perkembangan ekonomi terdorong menjadi otomatis. Konsentrasi industri menyebabkan runtuhnya produsen dan pedagang-pedagang kecil.

Campur tangan pemerintah terutama dalam hal sistem pajak, investasi pemerintah dan organisasi buruh makin bertambah kuat dan semakin tidak senang terhadap kepentingan kapitalis. Pada suatu tingkat dan keadaan politik serta sikap sosial tertentu, kelompok kapitalis dapat terus-menerus manaikan pendapatan riil. Tetapi menurut Schumpeter sistem kapitalis sendiri menyebabkan timbulnya politik dan sikap sosial yang merusak kapitalisme.

3) Peranan Faktor Endogen

Domar juga menekankan bahwa monopoli dapat menghambat inovasi dengan dihalang-halangnya penetrasian invensi yang baru. Ketakutan akan tanggungannya pasar oleh *excess capacity* dapat membatasi inovasi. Selanjutnya suatu inovasi menyebabkan hilangnya kepentingan-kepentingan yang telah ada.

Keadaan tersebut menunjukkan kemampuan para pengusaha monopoli untuk melindungi mereka sendiri dari hilangnya kapital atau alat-alat yang merusak perekonomian. Mereka berusaha menunda investasi sampai alat-alat yang ada itu habis nilainya karena susut, sehingga alat-alat teknik yang baru dapat di biayai dari hasil penyusutan kalau hasil inovasi itu dapat diterima.

2.1.2 Penerimaan Pemerintah

Di Indonesia penerimaan pemerintah dapat dibedakan atas dua sumber, yaitu:

- a. Penerimaan dalam negeri, yang terdiri atas penerimaan minyak bumi, gas alam (migas) dan penerimaan diluar migas.

- b. Penerimaan pembangunan, yang terdiri atas bantuan program dan bantuan proyek.

Penerimaan dalam negeri memiliki peranan yang sangat penting dalam membiayai kegiatan pembangunan. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan tersebut, maka penerimaan dalam negeri pun akan terus diusahakan untuk meningkat. Dalam perkembangan harga minyak yang berfluktuasi dan tidak pasti sejak tahun 1982, maka ketergantungan penerimaan dalam negeri pada sektor migas harus dikurangi. Implikasinya, penerimaan dalam negeri dari sektor di luar migas, dalam hal ini penerimaan pajak dan bukan pajak perlu di tingkatkan (Susanti, dkk., 1995).

Dana luar negeri masih tetap di manfaatkan, terutama untuk melengkapi sumber pembiayaan dalam negeri. Walaupun demikian jumlah serta persyaratannya (antara lain adanya ikatan politisi) terus harus di pertimbangkan.

1. Metode Estimasi

Penerimaan pemerintah, baik berupa pajak maupun lainnya merupakan suatu instrument untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian. Besar kecilnya kemampuan pemerintah dalam menghimpun dana dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain:

- a) Perbandingan penerimaan pemerintah terhadap Produk Domesti Bruto .
- b) Perbandingan penerimaan pajak terhadap basis pajak (*Tax Effort*).
- c) Proporsi pajak langsung dengan pajak tidak langsung.

2. Tax Effort

Tax Effort menunjukkan kemampuan pemerintah mengumpulkan dananya melalui pajak. Adapun rumus umum tax effort ini adalah sebagai berikut:

$$TE = \frac{\text{Penerimaan Pajak}}{\text{Basis Pajak}}$$

Pada umumnya yang digunakan sebagai *Proxy* untuk basis pajak dalam penggunaan rumus di atas adalah nilai PDB. Semakin besar nilai tax effort ini, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam menjangking dananya melalui pajak.

3. Proporsi Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

Indikator lain yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menjangking pajak adalah proporsi pajak langsung dengan pajak tidak langsung. Pada umumnya di negara yang sedang berkembang penerimaan dari pajak tak langsung relatif jauh lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pajak langsung. Hal ini sebaliknya terjadi di negara maju. Keadaan ini dapat dipisahkan dengan kesiapan administrasi aparat pajak..

2.1.3 Teori Pajak

1. Teori Pajak Musgrave

Pemerintah dalam menyelenggarakan fungsinya membutuhkan anggaran. Pendanaan anggaran tersebut dapat diperoleh dengan cara menjalankan kebijakan fiscal dan salah satunya yaitu dengan pemungutan pajak. Pemungutan pajak dibebankan kepada subjek (wajib pajak) dan objek (perusahaan). Dalam prakteknya pemungutan pajak harus dengan dasar hukum dan undang-undang yang berlaku. Dalam pemungutan pajak harus dipenuhi persyaratan struktur pajak yang baik, yaitu (Musgrave, 1993:230):

- a) Penerimaan atau pendapatan harus di tentukan dengan tepat.
- b) Distribusi beban pajak harus adil. Setiap orang harus dikenakan pembayaran dengan kemampuannya.
- c) Yang menjadi masalah penting adalah bukan hanya pada titik-titik mana pajak tersebut harus di bebaskan, tetapi oleh siapa pajak tersebut pada akhirnya harus ditanggung.
- d) Pajak harus dipilih sedemikian rupa untuk meminimumkan terhadap keputusan perekonomian, dalam hubungannya dengan pasar yang efisien.

- e) Struktur pajak harus memudahkan penggunaan kebijakan fiscal, untuk mencapai stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi.
- f) System pajak harus menerapkan administrasi yang wajar dan tegas atau pasti serta harus dapat dipahami oleh wajib pajak.
- g) Biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya, harus serendah mungkin jika dibandingkan dengan tujuan-tujuan lain.

Dalam melakukan pemungutan pajak terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya penerimaan pajak, yaitu:

1) Jumlah penduduk

Penduduk merupakan masyarakat yang menetap pada suatu daerah atau Negara tertentu. Besar kecilnya jumlah penduduk suatu Negara akan mempengaruhi penerimaan pajak. Musgrave menyatakan besar kecilnya jumlah penduduk pada suatu daerah atau Negara tidak menjamin besaran dari penerimaan pajak. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi. Jika suatu daerah atau Negara perekonomiannya baik maka masyarakat sejahtera dan mampu untuk membayar berbagai pungutan (salah satunya pajak). Namun jika perekonomian suatu daerah atau Negara buruk maka akan terjadi pengangguran dan banyaknya masyarakat yang memiliki penghasilan kecil yang hanya cukup untuk kebutuhan hidup sederhana yang tidak mungkin dibebani berbagai pungutan.

2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan sebuah tolak ukur gambaran perekonomian suatu Negara atau daerah. Besarnya PDRB berarti pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pendapatan dan kesejahteraan ekonomi juga akan meningkat secara otomatis. Dengan naiknya pendapatan masyarakat, maka tingkat konsumsi masyarakat akan meningkat pula, dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak. Disamping itu semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi kemampuan seseorang untuk membayar pajak (*ability to pay*) berbagai pungutan.

3) Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)

Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap perekonomian Indonesia belakangan jadi pusat perhatian dan ramai diperbincangkan mengingat jumlah lapangan kerja di sektor ini. UMKM atas peran pentingnya dalam penerimaan pajak yaitu ada dua jenis pajak utama yang sangat signifikan, yaitu PPh dan PPN, dengan PPh sebagai pajak dominan. Berdasarkan PP No. 46/2013, wajib pajak dengan peredaran usaha di bawah Rp 4,8 miliar dikenakan PPh 1 persen dari total peredaran usaha dan bersifat final. Pelaku UMKM tidak harus menghitung secara tepat berapa keuntungan yang dihasilkan karena pajak tersebut bersifat final sehingga tidak dipengaruhi oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan.

2. Pengertian Pajak

Pajak Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat.

Disamping itu ada beberapa definisi pajak menurut Undang-undang dan dari berbagai ahli di bidang perpajakan yang pada dasarnya memiliki inti yang sama, antara lain:

- a. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

- b. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra

prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

c. Prof. Dr. P. J. A. Adriani.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah (Siahaan, 2005:10). Dalam Mardiasmo (2002:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

d. Ghofir

Menurut Ghofir (2000:12) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

e. Mardiasmo

Menurut Mardiasmo (2002:9) pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b) Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi.
- c) Tidak ada kontra prestasi atau jasa timbal dari negara yang dapat dirasakan langsung oleh pembayar pajak.

- d) Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pusat maupun daerah (tidak boleh dilakukan oleh swasta yang orientasinya adalah keuntungan).
- e) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum.

3. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1) fungsi pajak ada dua, yaitu:

a. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

yaitu Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (*regulator*)

yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi Contoh: dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi terhadap minuman keras dapat ditekan.

4. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) dalam hukum pajak terdapat berbagai perbedaan jenis-jenis pajak yang terbagi dalam golongan-golongan besar. Perbedaan dan pengelompokan ini mempunyai fungsi yang berbeda. Berikut adalah pengelompokan pajak:

a. Menurut golongannya.

1) Pajak langsung.

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

2) Pajak tidak langsung.

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

- b. Menurut Sifatnya.
 - 1) Pajak Subjektif.

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - 2) Pajak Objektif.

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
 - c. Menurut Lembaga Pemungutnya.
 - 1) Pajak Pusat.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Banugnan, dan Bea materai.
 - 2) Pajak Daerah.

Pajak dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan PajakBahan Bakar Kendaraan Bermotor.Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan pajak hiburan.
5. Sistem pemungutan pajak
- Menurut Waluyo dan Ilyas (2007:15) system pemungutan pajak dibagi menjadi 3 yaitu:
- a. *Official Assessment System*, yaitu pemerintah (Fiskus) yang mempunyaiwewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang. Artinya WajibPajak bersifat pasif karena utang pajak baru timbul setelah dikeluarkansurat ketetapan pajak oleh fiskus.
 - b. *Self Assessment system*, yaitu Wajib Pajak bersikap aktif karena diberikanwewenang oleh fiskus untuk menghitung, menyettor atau membayar,

dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar atau terhutang. Fiskus hanya mengawasi.

- c. *Withholding tax system*, yaitu pihak ketiga (pemberi penghasilan) diberikan wewenang oleh fiskus untuk melakukan pemungutan dan atau pemotongan pajak kepada pihak lain yang menerima penghasilan sebesar jumlah pajak yang terhutang.

6. Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, yaitu:

a. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel Anggapan (*fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya, sehingga penentuan pajak tidak akurat.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak

menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya, maka dapat diminta kembali.

7. Asas Pemungutan Pajak

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli ekonomi mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, yaitu:

a. Menurut Adam Smith dalam bukunya “*Wealth of Nations*” dengan teori “*The Four Maxims*”, asas dalam pungutan pajak adalah sebagai berikut:

1) Asas *Equality* (Asas Keadilan)

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayarpajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil di maksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah dengan kepentingannya dan manfaat yang diterima.

2) Asas *Certainty* (Asas Kepastian Hukum)

Penerapan pajak itu tidak ditentukan dengan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3) Asas *Convenience of Payment* (Asas Pemungutan Pajak yang Tepat Waktu)

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, misalnya pada saat memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut juga *Pay as You Earn*.

4) Asas *Efficiency* (Asas Efisien atau Ekonomis)

Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

b. Menurut W.J Langenasas pemungutan pajak adalah:

- 1) Asas daya pikul adalah besar kecilnya pajak yang dipungut harus disesuaikan dengan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan wajib pajak maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
- 2) Asas manfaat adalah pajak yang dipungut oleh Negara harus digunakan untuk kegiatan pembangunan dan untuk kepentingan umum.
- 3) Asas kesejahteraan adalah pajak yang dipungut oleh Negara da digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 4) Asas kesamaan adalah dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lainnya harus diperlakukan sama dalam jumlah tariff pajak.
- 5) Asas beban yang sekecil-kecilnya adalah pemungutan pajak di usahakan serendah mungkin, apabila dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan wajib pajak.

c. Menurut Adolf Wagner asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Asas politik financial adalah pajak yang dipungut Negara jumlahnya harus memadai sehingga dapat membiayai pebangunan dan mendorong seluruh kegiatan Negara.
- 2) Asas ekonomi adalah dalam penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya pajak pendapatan dan pajak barang-barang mewah.
- 3) Asas keadilan adalah pungutan pajak berlaku secara umum tanpa terkecuali, dalam pemungutannya harus adil.
- 4) Asas administrasi adalah mengatur segala urusan dalam perpajakan, seperti menyangkut masalah kapan dan dimana harus membayar, cara membayar pajak dan besarnya biaya pajak.
- 5) Asas yuridis adalah segala pungutan pajak harus berdasarkan pada Undang-Undang.

2.1.4 Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Jenis pajak daerah

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

- 1) Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi.
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
 - d) Pajak Air Permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
 - e) Pajak Rokok, yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
- 2) Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota
 - a) Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,

pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

- b) Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- c) Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- d) Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
- e) Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
- g) Pajak Parkir, yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

- h) Pajak Air Tanah, yaitu pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- i) Pajak Sarang Burung Walet, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan dan pengusahaan sarang burung walet.
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

2.1.5 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memberikan dampak positif dalam pembangunan daerah. Kontribusinya terhadap pembangunan lokal atau daerah adalah kemampuannya menggali potensi daerah sekaligus menentukan pola pembangunan ekonominya (Rumyati, 2012). Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 ada beberapa kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kriteria UMKM tersebut disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 Kriteria UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008 Berdasarkan Asset dan Omzet

No	Usaha	Kriteria	
		Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks. 50 juta	Maks. 300 juta
2	Usaha Kecil	>50 juta -500 juta	>300 juta-2,5 milyar
3	Usaha Menengah	>500 juta-10 milyar	>2,5 milyar-50 milyar

Sumber: Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

1. pengertian UMKM

a. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria. Usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

b. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

c. Usaha menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana di ataur dalam undang-undang ini.

2. Industri Kecil dan Menengah

Definisi industri kecil menurut UU No. 9/1995 adalah industri yang nilai kekayaannya lebih dari 200 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Berdasarkan sifat dan orientasinya industri kecil dikelompokkan menjadi empat kelompok (Raharja, 1984).

- a) Industri yang memanfaatkan potensi dan sumber alam, umumnya berorientasi pada pemrosesan bahan mentah menjadi bahan baku, baik dari hasil pertanian, bahan galian, hasil laut dan sebagainya;
- b) Industri yang memanfaatkan keterampilan dan bakat tradisi;
- c) Industri penghasil benda-benda seni yang memiliki mutu dan pemasaran khusus;
- d) Industri yang terletak di daerah pedesaan.

3. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut rencana induk pengembangan industri kecil dan menengah yang disusun oleh (disperindag, 2002) mengidentifikasi karakteristik industri kecil menengah sebagai berikut:

- a. Bahan bakunya mudah diperoleh, terutama karena tersedia di daerah.
- b. Menggunakan teknologi sederhana, sehingga mudah dilakukan alih teknologi.
- c. Keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun temurun.
- d. Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.
- e. Sebagian besar produknya terserap dipasar lokal atau domestik dan tidak tertutup kemungkinan untuk di ekspor.
- f. Beberapa komoditi tertentu memiliki ciri khas terkait dengan karya seni budaya daerah setempat.
- g. Melibatkan masyarakat ekonomi lemah.

2.1.6 Pengertian Penduduk

Proses pembangunan ekonomi biasanya tidak hanya ditandai dengan terjadinya perubahan atau pergeseran pada struktur permintaan dan penawaran barang dan jasa yang diproduksi, namun juga di tandai dengan terjadinya

perubahan struktur penduduk dan ketenagakerjaan. Istilah yang di berikan oleh Chenery dan Syrquin untuk perubahan tersebut adalah proses demografi. Proses demografi ini terutama terjadi sebagai akibat dari perubahan pada struktur permintaan, struktur produksi dan perbaikan fasilitas kesehatan, gizi serta pendidikan yang timbul seiring dengan pertumbuhan ekonomi (Susanti, dkk., 1995).

Jumlah penduduk negara mempunyai peranan ganda yang strategis pada sisi pasar faktor produksi yaitu tenaga kerja baik yang bersifat tenaga ahli (*skill*) maupun buruh kasar (*labor*). Sehingga penambahan jumlah penduduk memungkinkan dengan penambahan hasil produksi barang dan jasa. Djojohadikusumo (1994) mengatakan bahwa penduduk adalah sumberdaya yang mempunyai peranan sentral sehingga harus di berikan perhatian utama khususnya bagi negara sedang berkembang karena ini ada hubungannya dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Secara tradisional jumlah penduduk di anggap sebagai faktor yang berdampak positif bagi pertumbuhan dan pembangunan karena dari penduduk itu sendiri akan terserap tenaga kerja yang artinya membangun tenaga yang produktif dan akan di hasilkan barang yang produktif pula, sehingga pertambahannya akan membawa angin positif (Todaro, 2004).

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap (Chairany, 2010).

Tingkat pertumbuhan penduduk di suatu negara atau wilayah, pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh angka kelahiran, kematian dan migrasi yang terjadi di negara/wilayah tersebut.

1. Komponen Pertumbuhan Penduduk

a. Fasilitas (Kelahiran)

Fasilitas sebagai istilah demografi di artikan sebagai hasil produksi yang nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita, dengan kata lain fasilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Natalitas mempunyai arti yang sama dengan fasilitas hanya bedanya pada ruang lingkungannya saja. Fasilitas

menyangkut peranan kelahiran pada perubahan penduduk sedangkan natalitas merupakan peranan kelahiran pada perubahan penduduk dan reproduksi manusia.

b. *Mortalitas* (Kematian)

Mortalitas atau kematian merupakan salah satu di antara tiga komponen demografi yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk. Informasi tentang kematian penting, tidak saja bagi pihak swasta, yang terutama berkecimpung dalam bidang ekonomi dan kesehatan. Mati adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.

Data kematian sangat diperlukan antara lain untuk proyeksi penduduk guna perancangan pembangunan. Misalnya, perencanaan fasilitas perumahan, fasilitas pendidikan, dan jasa-jasa lainnya untuk kepentingan masyarakat. Data kematian juga diperlukan untuk kepentingan evaluasi terhadap program-program kebijakan penduduk.

c. *Migrasi* (*Migration*)

Migrasi merupakan salah satu faktor dasar yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Peninjauan migrasi secara regional sangat penting untuk di olah secara khusus mengingat adanya faktor-faktor pendorong dan penarik bagi orang-orang untuk melakukan migrasi, dipihak lain, komunikasi termasuk transportasi semakin lancar.

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/negara atau batas administratif/batas bagian dalam suatu negara. Jadi migrasi diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah kedaerah lain.

Migrasi antar bangsa (migrasi internasional) tidak begitu berpengaruh dalam menambah atau mengurangi jumlah penduduk suatu negara kecuali di beberapa negara tertentu yang berkenaan dengan pengungsian, akibat dari bencana baik alam atau perang. Pada umumnya orang yang datang dan pergi antar negara boleh dikatakan berimbang saja jumlahnya. Peraturan-perturan atau undang-undang yang di buat oleh negara sangat sulit dan ketat bagi seseorang untuk bisa menjadi warga atau menetap secara permanen di suatu negara lain.

2. Teori-teori Kependudukan

Tingginya laju pertumbuhan penduduk di beberapa bagian di dunia ini menyebabkan jumlah penduduk meningkat dengan cepat. Di beberapa bagian di dunia ini telah terjadi kemiskinan dan kekurangan pangan. Fenomena ini menggelisahkan para ahli, dan masing-masing dari mereka berusaha mencari faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan tersebut.

Umumnya para ahli dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama terdiri dari penganut aliran *Malthusian*. Aliran *Malthusian* di pelopori oleh Thomas Robert Malthus, dan aliran *Neo Malthusian* dipelopori oleh Garreth Hardin dan Paul Ehrlich. Kelompok kedua terdiri dari penganut aliran *Marxist* yang dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Kelompok ketiga dari pakar-pakar teori kependudukan mutakhir yang merupakan reformulasi teori-teori kependudukan yang ada.

a. Aliran *Malthusian*

Aliran ini dipelopori oleh Thomas Robert Malthus, seorang pendeta Inggris, hidup pada tahun 1766 hingga 1834. Pada permulaan tahun 1798 lewat karangan yang berjudul "*Essai on Principle of Populations as it Affect the Future Employment of Society, with Remarks on the Specculation of Mr. Godwin, M. Condorcet, and Other Writers*", menyatakan bahwa penduduk (seperti juga tumbuhan dan binatang) apabila tidak ada pembatasan, akan berkembang biak dengan cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari permukaan bumi ini. Disamping itu Malthus berpendapat bahwa untuk hidup manusia memerlukan bahan makanan, sedangkan laju pertumbuhan bahan makanan jauh lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Apabila tidak di adakan pembatasan terhadap pertumbuhan penduduk, maka manusia akan mengalami kekurangan bahan makanan. Inilah sumber kemelaratan dan kemiskinan manusia.

Untuk dapat keluar dari permasalahan kekurangan pangan tersebut, pertumbuhan penduduk harus dibatasi. Menurut Malthus pembatasan tersebut dapat dilakukan dengan cara yaitu *Preventive Checks*, dan *Positive Checks*. *Preventive Checks* adalah pengurangan penduduk melalui kelahiran. *Positive*

Checks adalah pengurangan penduduk melalui proses kematian. Apabila di suatu wilayah jumlah penduduk melebihi jumlah persediaan bahan pangan, maka tingkat kematian akan meningkat mengakibatkan terjadinya kelaparan, wabah penyakit dan lainnya. Proses ini akan terus berlangsung sampai jumlah penduduk seimbang dengan persediaan bahan makanan.

b. Aliran *Neo-Malthusian*

Pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, teori Malthus mulai diperdebatkan lagi. Kelompok yang menyokong aliran Malthus tetapi lebih dekat disebut dengan kelompok *Neo-Malthusianism*. Menurut kelompok ini (yang dipelopori Garreth Hardin dan Paul Ehrlich), pada abad ke-20 (pada tahun 1950-an), dunia baru yang pada jamannya Malthus masih kosong kini sudah mulai penuh dengan manusia, dunia baru sudah tidak mampu untuk menampung jumlah penduduk yang selalu bertambah.

Pad Ehrlich dalam bukunya "*The Population Bomb*" pada tahun 1971, menggambarkan penduduk dan lingkungannya yang ada di dunia dewasa ini sebagai berikut. Pertama, dunia ini sudah terlalu banyak manusia; kedua, keadaan bahan makanan sangat terbatas; ketiga, karena terlalu banyak manusia di dunia ini lingkungan hidup sudah banyak yang tercemar dan rusak.

c. Aliran *Marxist*

Aliran ini dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Tatkala Thomas Robert Malthus meninggal di Inggris pada tahun 1834, mereka berusia belasan tahun. Kedua-duanya lahir di Jerman kemudian secara sendiri-sendiri hijrah ke Inggris. Pada waktu itu teori *Malthus* sangat berpengaruh di Inggris maupun di Jerman. Marx dan Engels tidak sependapat dengan Malthus yang menyatakan bahwa apabila tidak di adakan pembatasan terhadap pertumbuhan penduduk, maka manusia akan kekurangan bahan pangan. Menurut Marx tekanan penduduk yang terdapat di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan penduduk terhadap kesempatan kerja. Kemelaratan terjadi bukan disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat, tetapi kesalahan masyarakat itu sendiri seperti yang terdapat pada negara-negara

kapitalis. Kaum kapitalis akan mengambil sebagian pendapatan dari buruh sehingga menyebabkan kemelaratan buruh tersebut.

Selanjutnya Marx berkata, kaum kapitalis membeli mesin-mesin untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang di lakukan oleh buruh. Jadi, penduduk yang melarat bukan disebabkan oleh kekurangan bahan pangan, tetapi karena kaum kapitalis mengambil sebagian dari pendapatan mereka. Jadi menurut Marx dan Engels sistem kapitalis yang menyebabkan kemelaratan tersebut. Untuk mengatasi hal-hal tersebut maka struktur masyarakat harus diubah dari sistem kapitalis ke sistem sosialis.

d. Teori *John Stuart Mill*

John Stuart Mill, seorang ahli filsafat dan ahli ekonomi berkebangsaan Inggris dapat menerima pendapat Malthus mengenai laju pertumbuhan penduduk melampaui laju pertumbuhan bahan makanan sebagai suatu aksioma. Namun demikian ia berpendapat bahwa pada situasi tertentu manusia dapat mempengaruhi perilaku demografinya. Selanjutnya ia mengatakan apabila produktifitas seseorang tinggi ia cenderung ingin mempunyai keluarga yang kecil. Dalam situasi seperti ini fertilitas akan rendah. Tidaklah benar bahwa kemiskinan tidak dapat dihindarkan atau kemiskinan itu disebabkan karena sistem kapitalis. Kalau pada suatu waktu di suatu wilayah terjadi kekurangan bahan makanan, maka keadaan ini hanya bersifat sementara saja. Pemecahannya ada dua kemungkinan yaitu: mengimpor bahan makanan, atau memindahkan sebagian penduduk wilayah tersebut ke wilayah lain.

Memperhatikan bahwa tinggi rendahnya tingkat kelahiran ditentukan oleh manusia itu sendiri, maka Mill menyarankan untuk meningkatkan tingkat golongan yang tidak mampu, dengan meningkatnya pendidikan penduduk maka secara rasional mereka mempertimbangkan perlu tidaknya menambah jumlah anak sesuai dengan karir dan usaha yang ada. Di samping itu Mill berpendapat tidak menghendaki anak yang banyak, dan apabila kehendak mereka diperhatikan maka tingkat kelahiran akan rendah.

3. Rasio Jenis Kelahiran

Rasio jenis kelahiran adalah perbandingan banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan wilayah tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki perseratus perempuan. Secara umum rumus rasio dapat dituliskan sebagai berikut:

$$SR = \frac{\text{Jumlah Penduduk Laki-laki}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan}} \times k$$

Dimana:

k = konstanta, biasanya nilainya 100.

2.1.7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh nilai tambah pada produk yang ditimbulkan oleh berbagai sektor lapangan usaha, yang melaksanakan kegiatan usahanya di suatu daerah tertentu tanpa memperhatikan kepemilikan atas dasar faktor produksi. PDRB secara agresif menunjukkan kemampuan suatu daerah tertentu dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa kepada faktor-faktor yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi. PDRB merupakan salah satu ukuran dari tingkat pendapatan masyarakat dapat digunakan sebagai bahan evaluasi hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan (Badan Pusat Statistika Kabupaten Jember, 2013).

Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:

1. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu wilayah selama periode satu tahun. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi sembilan sektor, yaitu:

- a) Pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan.
- b) Pertambangan dan penggalian.

- c) Listrik, gas dan air bersih.
- d) Industri pengolahan.
- e) Bangunan.
- f) Perdagangan, hotel dan restoran.
- g) Pengangkutan dan komunikasi.
- h) Jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.
- i) Jasa-jasa.

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB adalah belas jasa faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu wilayah yang ikut serta dalam proses produksi selama satu tahun. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya. Pengertian PDRB memuat pula komponen penyusutan dan pajak tidak langsung netto. Jumlah semua komponen pendapatan ini per-sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. PDRB merupakan penjumlahan nilai tambah bruto dari seluruh sektor lapangan usaha.

3. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah pengeluaran, konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga, lembaga-lembaga sosial, pemerintah, pembentukan modal tetap, kenaikan stok dan *ekspor netto* suatu wilayah selama periode satu tahun.

PDRB secara berkala dapat disajikan dalam dua bentuk, antara lain:

- a. PDRB atas harga yang berlaku adalah semua agregat pendapatan yang dinilai atas harga yang berlaku pada masing-masing tahun, baik pada saat ini produksi dan biaya maupun pada komponen pengeluaran PDRB;
- b. PDRB atas harga konstan suatu tahun dasar adalah semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang terjadi pada tahun dasar. Karena menggunakan harga tetap maka perkembangan harga dari tahun-ketahun semata-mata disebabkan oleh perkembangan riil dari suatu kuantum produksi tanpa mengandung fluktuasi harga.

PDRB memiliki kegunaan, antara lain:

- a) Untuk mengetahui laju perkembangan ekonomi daerah baik secara sektoral maupun secara keseluruhan.
- b) Untuk mengetahui gambaran struktur perekonomian daerah.
- c) Untuk mengetahui potensi ekonomi daerah.
- d) Untuk mengetahui tingkat perubahan harga terjadi.
- e) Untuk mengetahui perkembangan pendapatan regional per kapita di suatu daerah selama satu tahun.

Perhitungan PDRB memiliki banyak manfaat bagi berbagai pihak, yang dapat di kelompokkan menjadi empat, antara lain:

- a) Mengetahui dan menelaah struktur atau susunan perekonomian daerah. Artinya, dari perhitungan PDRB dapat diketahui apakah suatu daerah tersebut merupakan daerah pertanian, industri, perdagangan atau jasa.
- b) Membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu. Dalam perhitungan PDRB angka yang di catat merupakan penjumlahan angka-angka dari waktu ke waktu tertentu, misalnya satu tahun. Sehingga kita dapat membandingkan perekonomian dari tahun ke tahun. Perbandingan tersebut dapat memberikan gambaran apakah ada kenaikan atau penurunan, apakah ada kemakmuran atau tidak, sehingga angka perbandingan tersebut dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan dalam melaksanakan program pembangunan selanjutnya.
- c) Membandingkan perekonomian antar daerah. Dalam pemabngunan PDRB dapat digunakan pemerintah untuk mengambil kebijaksanaan dalam menentukan program pembangunan daerahnya dengan daerah lain. Perbandingan ini penting bagi suatu daerah karena dengan demikian dapat diketahui tingkat kemajuan daerah tersebut.
- d) Merumuskan kebijakan pemerintah. Dalam perhitungan PDRB angka yang dicatat merupakan angka yang berguna untuk membantu dalam merumuskan kebijakan pemerintah daerahnya. Dengan mengetahui besarnya PDRB dapat pula ditentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang

ditargetkan dalam proses pembangunan sebelumnya dan bagaimana komposisi pada tiap-tiap sektor ekonomi.

- e) Presentase PDRB secara sektoral menunjukkan tentang peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar presentase suatu sektor dalam kontribusinya maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Walaupun demikian dengan hanya melihat perkembangan suatu sektor tersebut dalam PDRB. Jadi, presentase ini dapat di anggap sebagai penimbang apabila kita ingin melihat perkembangan sektoral secara teliti.

2.1.8 Hubungan Jumlah Penduduk dan Pajak

Penduduk merupakan unsur penting yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penduduk yang besar akan menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi dan merangsang tingkat output atau produksi agregat yang lebih tinggi yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional, yang berpengaruh pula terhadap peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Insukindro (1994) peningkatan pendapatan nasional tersebut akan menciptakan wajib pajak baru, jadi Insukindro menyimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk bila ditangani dengan serius akan menambah jumlah wajib pajak yang membayar pajak. Sehingga hal ini dapat meningkatkan penerimaan pajak, Tapi jika pertambahan penduduk tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas maka jumlah penduduk hanya akan menjadi beban negara dan tidak akan menghasilkan atau menambah wajib pajak yang baru. Oleh sebab itu, kesimpulan awalnya adalah di mungkinkan ada pengaruh yang signifikan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak.

2.1.9 Hubungan Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pajak

Bahwa jumlah usaha kena pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak. Jumlah Industri Kecil dan Menengah adalah perusahaan yang memiliki hubungan dengan penerimaan pajak karena industri

besar dan sedang adalah wajib pajak. Sehingga di mungkinkan ada pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Jika jumlah industri meningkat maka penerimaan pajak juga akan meningkat (Saefudin, 2008).

2.1.10 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pajak

Penelitian *ex post facto* yang merupakan penelitian dari peristiwa yang telah terjadi dan kemudian diruntut mengenai faktor-faktor yang di pengaruhi dari beberapa sumber. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerimaan pajak di pengaruhi secara langsung atau tidak secara langsung oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sehingga ada pengaruh positif dan signifikan PDRB terhadap penerimaan pajak (Nasution, 2003).

2.2 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Muhammad Rofik (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Industri Besar dan Sedang, PDRB terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Sumenep”. Hasil Penelitian bahwa ditemukan Jumlah Penduduk, Industri Besar dan Sedang serta Jumlah PDRB Kabupaten Sumenep berpengaruh signifikan atau positif terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sumenep. Bertujuan untuk memberikan aspirasi pemikiran terhadap pengambil kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah daerah di Kabupaten Sumenep dalam memutuskan sebuah kebijakan terkait perpajakan. Agar pelaksanaan dan aplikasinya memiliki sasaran yang nertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep. Alokasi dari penerimaan pajak tersebut akan digunakan untuk infrastruktur dan lain sebagainya di Kabupaten Sumenep.

Rahmanta (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan SBI terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa $R^2 = 0,9939$ yang bermakna bahwa variasi Produk Domestik Bruto (PDB) dan Tingkat Suku Bunga SBI mampu menjelaskan variasi penerimaan pajak sebesar 99,39 persen, dan sisanya 0,61 persen dijelaskan oleh variabel lain yang di masukan dalam model estimasi, dan hasil selanjutnya

diperoleh bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh Positif atau signifikan terhadap penerimaan pajak dan tingkat suku bunga SBI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak dengan menggunakan uji parsial. Dari hasil tersebut diharapkan nantinya pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar lebih serius dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana karena apabila peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan PDB, sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak oleh pemerintah.

Agus Wahyu Widodo (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB Kabupaten Jember”. Bertujuan untuk mengetahui bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap PDRB Kabupaten Jember karena hasil pajak daerah digunakan pemerintah daerah untuk pembangunan sarana dan prasarana sektor publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Yohan Dwi Artha (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Factor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak daerah Kabupaten Jember”. Bertujuan untuk mengetahui bahwa jumlah penduduk, PDRB dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten jember. Karena pajak daerah tersebut digunakan pemerintah daerah untuk pembangunan sarana dan prasarana sektor public yang dapat dinikmati oleh masyarakat dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 2.2 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Nama Peneliti	Judul	Alat Analisis	Variabel	Hasil Penelitian
Rifik, M (2011)	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Industri Besar dan Sedang, PDRB terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sumenep.	Deskriptif Kuantitatif	Jumlah Penduduk, Industri Besar dan Sedang, PDRB.	Jumlah Penduduk, Industri Besar dan Sedang, dan PDRB memiliki Pengaruh yang Signifikan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Surakarta.
Rahmanta (2011)	Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan SBI terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia	<i>Ordinary Least Square (OLS)</i>	Penerimaan Pajak, PDB, Suku Bunga, SBI.	Produk Domestik Bruto (PDB) akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, dan tingkat suku bunga SBI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.
Widodo (2011)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap	<i>Regresi Linear Berganda</i>	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PDRB	Pajak daerah, retribusi daerah dan juga PDRB berpengaruh positif/signifikan

	PDRB kabupaten Jember			terhadap Produk domestik regional bruto
Yohan, D. A (2016)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember	<i>Regresi Linear berganda</i>	Pajak Daerah, PDRB, Jumlah Penduduk, Inflasi	1. Jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten Jember. 2. Inflasi berpengaruh negative terhadap penerimaan pajak kabupaten jember.

2.3 Kerangka Konseptual

Permasalahan ekonomi regional yang selalu terjadi disetiap daerah yaitu tingkat pertumbuhan ekonominya, dimana tingkat keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya (sukirno,2004). Secara diketahui, laju pertumbuhan ekonomi di Karesidenan Basuki sedang mengalami peningkatan yang signifikan dan hingga mencapai angka tertinggi. Menurut data dari Badan Pusat Statistika (2014) mengatakan saat ini pertumbuhan ekonomi di Karesidenan Basuki meningkat sebesar 6,27% pada tahun 2014. Terdapat dua teori pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya Teori Klasik dan Teori Neo-Klasik.

Teori pertumbuhan klasik ini kemudian dikembangkan oleh Coob-Douglas, dimana ia mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh faktor produksi diantaranya stok modal, tenaga kerja dan teknologi. Tenaga Kerja terjadi ketika jumlah dari penduduk, dimana Jumlah Penduduk merupakan kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan Penerimaan Pemerintah. Peningkatan tenaga kerja akan membawa efek positif

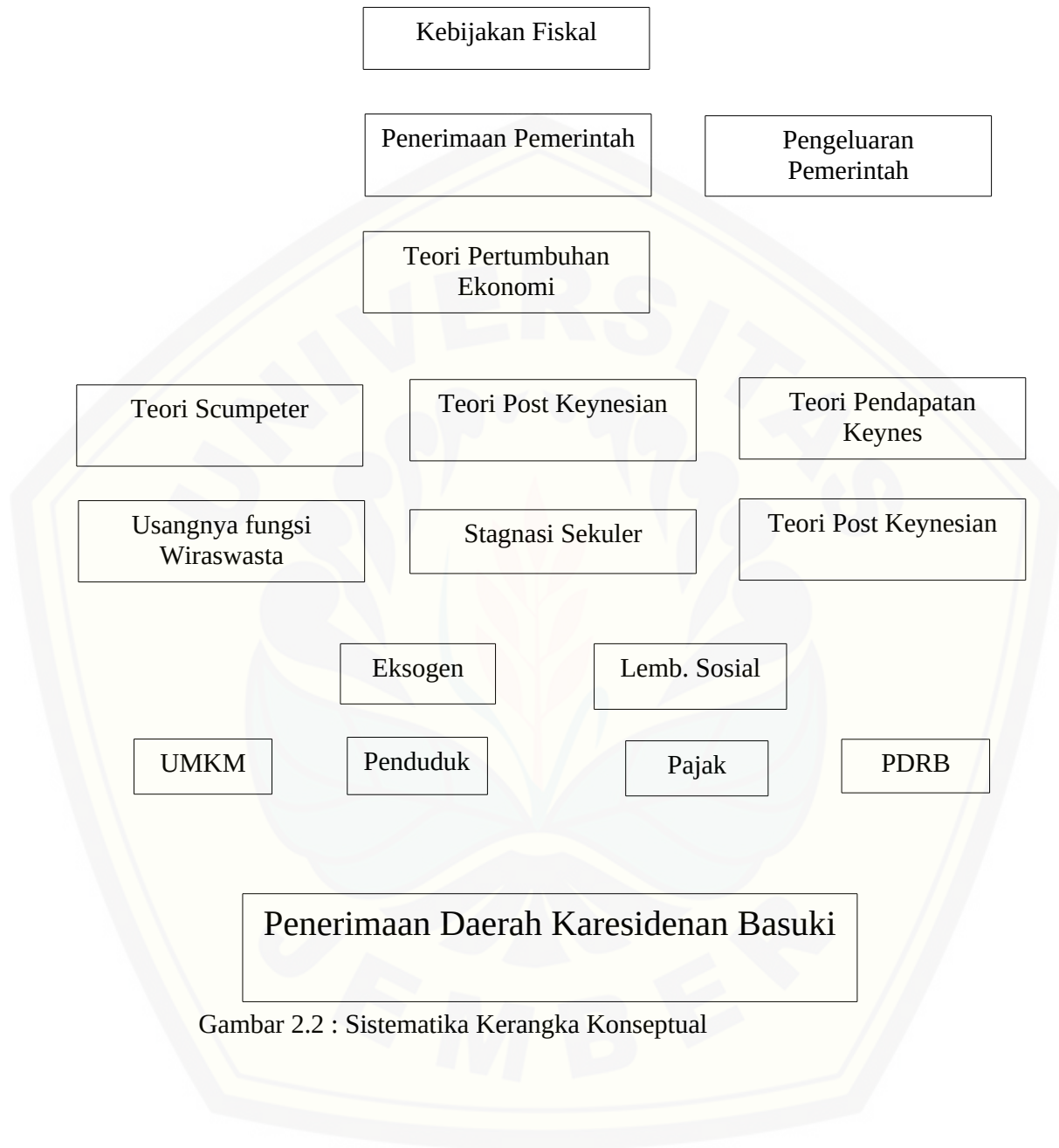
dalam pertumbuhan ekonomi, sementara teknologi sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2006). Teori klasik ini hampir sama dengan teori Neo-Klasik yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat di pengaruhi oleh faktor produksi yang selanjutnya teori neoklasik ini kemudian dikembangkan lagi oleh Paul Romer dan Robert lucas menjadi teori pertumbuhan endogen. Dimana teori ini menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang terhambat akibat infrastruktur yang tidak bagus, maka dari itu teori ini menekankan pada kebijakan pemerintah dalam penggunaan APBD dan akumulasi kapital yang dikutip dari buku Sukirno (2008) bahwa pertumbuhan ekonomi suatu Negara tidak luput dari kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam penyediaan lapangan kerja baru, fasilitas-fasilitas umum dan lain-lain. Teori ini sefaham dengan Bricker dan Rietveld (2009) dalam (Capello dan Peter, 2009) mengutarakan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh Jumlah Penduduk sebagai tenaga kerja produksi, penerimaan pemerintah sebagai pembiayaan infrastruktur untuk tujuan pembangunan dan kesejahteraan, dan tenaga kerja. Sementara menurut pendekatan Keynesian, tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari determinasi pendapatan nasional diantaranya konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor (Karlita, 2013).

Menurut pemahaman Keynesian, konsumsi rumah tangga di artikan sebagai industri (UMKM) yang bertujuan untuk menaikkan pendapatan riil masyarakat. Oleh sebab itu konsumsi rumah tangga, PDRB dan ekspor merupakan komponen dari pendapatan nasional.

Berdasarkan variable-variabel tersebut yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selanjutnya akan di analisis menggunakan analisis ordinary least square (OLS) untuk menjawab rumusan masalah penelitian dengan melihat pengaruh jumlah penduduk, UMKM, dan PDRB terhadap penerimaan pajak daerah Karesidenan Basuki.

Gambar 2.2 Sistematika Kerangka Konseptual

- | |
|---|
| Permasalahan Ekonomi :
1. Pembangunan ekonomi
2. Kebijakan Moneter
3. Kebijakan Fiskal |
|---|

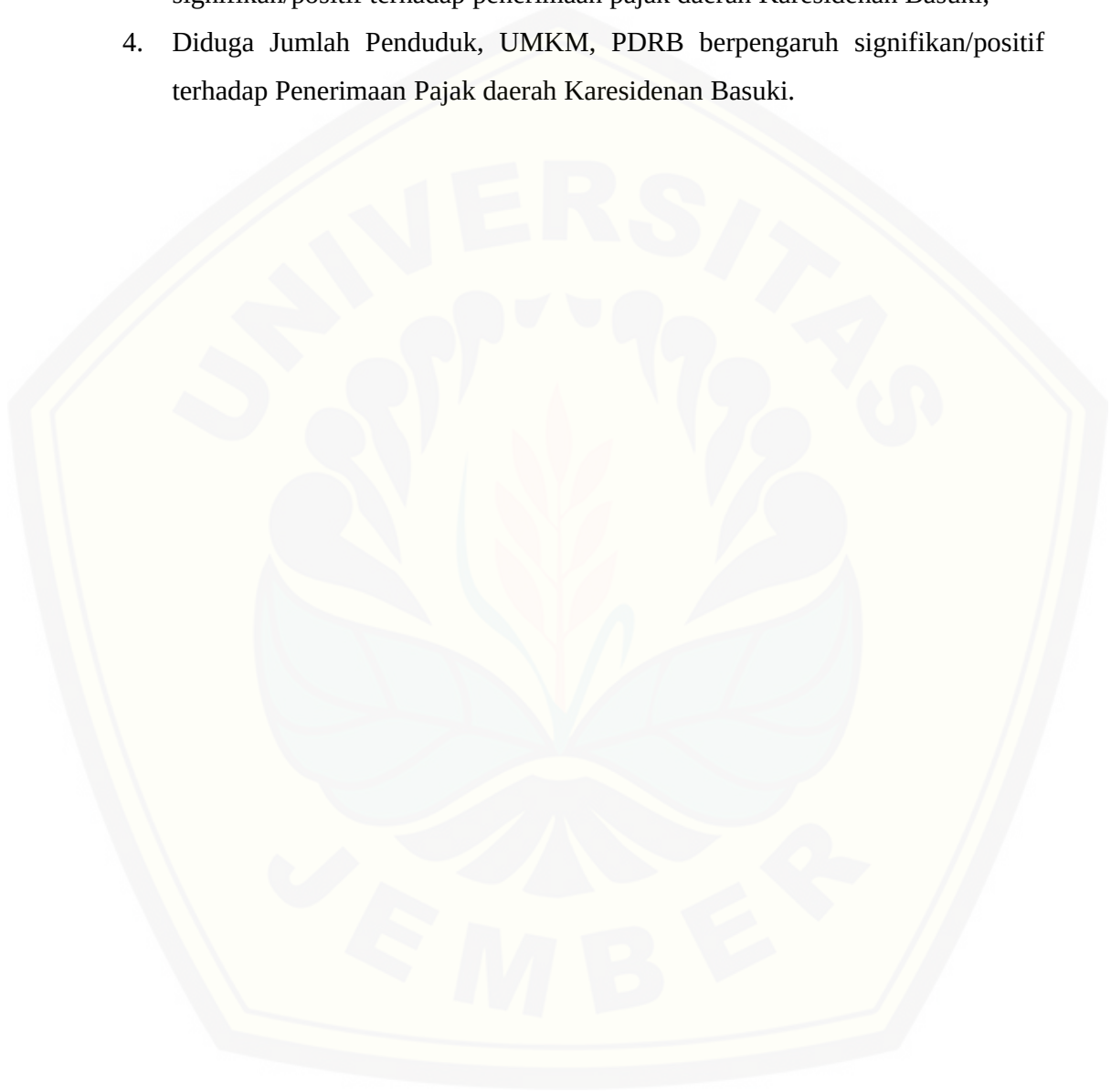


Gambar 2.2 : Sistematika Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

1. Diduga Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan/positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah Karesidenan Basuki;

2. Diduga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berpengaruh signifikan/positif terhadap penerimaan pajak daerah Karesidenan Basuki;
3. Diduga Jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan/positif terhadap penerimaan pajak daerah Karesidenan Basuki;
4. Diduga Jumlah Penduduk, UMKM, PDRB berpengaruh signifikan/positif terhadap Penerimaan Pajak daerah Karesidenan Basuki.



BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan bagian metodologi penelitian yang digunakan untuk mengestimasi variabel-variabel dependen dan independent yang dipakai pada penelitian ini berdasarkan perolehan data. Dan juga akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil estimasi dari data ini akan digunakan untuk menjawab pertanyaan empiris menggunakan metode analisis regresi data panel.

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk data panel, yaitu berupa gabungan dari data *Time Series* dan data *Cross-Section*. Data *Time series* yang digunakan pada penelitian ini selama tahun 2000-2014 atau selama 15 tahun, kemudian data *cross-section* yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso atau N sama dengan 4 objek.

3.2 Spesifikasi Model Penelitian

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang menjadi acuan penelitian ini, model yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari model penelitian Rahmanta 2011 dan M. Rofiq 2011 maka spesifikasi model yang digunakan menjadi:

$$\text{PAJAK} = f(\text{PDDK}, \text{PDRB}, \text{UMKM}) \dots\dots\dots (3.1)$$

Model tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam sebuah model ekonometrika, yaitu:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots\dots\dots (3.2)$$

Menjadi:

$$PAJAK_t = \beta_0 + \beta_1 PDDK_t + \beta_3 PDRB_t + \beta_2 UMKM_t + e_t \dots\dots\dots (3.3)$$

Dimana:

PAJAK	= Penerimaan Pajak (Juta Rupiah)
$PDDK_t$	= Jumlah Penduduk daerah Jember (Jiwa)
$UMKM_t$	= Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Unit)
$PDRB_t$	= Jumlah PDRB Kabupaten Jember (Juta Rupiah)
t	= Tahun
β_0	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien Regresi
e	= <i>Error Term</i>

Spesifikasi persamaan di atas menggambarkan bahwa nilai Penerimaan Pajak Daerah Karesidenan Basuki dipengaruhi oleh faktor-faktor penarik. Perbedaan model yang digunakan dalam penelitian terdahulu tidak terlalu jauh berbeda yaitu variabel yang digunakan untuk lebih menspesifikasikan hasil yang ingin di capai dan juga mempermudah analisis data tanpa terlepas dari permodelan yang di adopsi.

3.3 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan empiris terkait pengaruh Jumlah Penduduk, UMKM, PDRB terhadap Penerimaan Pajak Daerah Karesidenan Basuki, maka akan digunakan metode analisis *Ordinary least Square* (OLS).

3.4 Metode Analisis *Ordinary Least Square* (OLS)

Seperti kebanyakan alat analisis yang sering digunakan dalam penelitian, metode OLS atau kuadrat terkecil merupakan analisis yang paling sederhana dalam mengestimasi parameter regresi. Metode OLS merupakan metode estimasi dengan menggunakan residual terkecil dan menjumlahkan kuadrat terkecil, sehingga dapat diketahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait dan

melihat hasil estimasi dari kriteria pengujian statistik yang terdiri dari pengujian secara parsial pada masing-masing variabel independen, pengujian secara simultan pada keseluruhan variabel independen, serta pengujian nilai varians variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian ini (Wardhono, 2004:24).

3.4.1 Uji F-Statistik (Uji Simultan)

Uji F dimaksudkan untuk menguji signifikansi hubungan secara simultan antara Jumlah Penduduk, UMKM, Dan PDRB terhadap Penerimaan Pajak Daerah Karesidenan Basuki (Supranto, 2005:14)

Nilai F hitung di cari dengan rumus :

$$F_{hit} = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/(n-k)}$$

Keterangan:

R^2 = koefisien determinasi

K = banyaknya Variabel

N = jumlah observasi

Perumusan Hipotesis:

$H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$, H_0 diterima H_a ditolak artinya secara simultan variabel jumlah penduduk, UMKM, dan PDRB tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Karesidenan Basuki.

$H_a : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$, H_0 ditolak H_a diterima artinya secara simultan variabel jumlah penduduk, UMKM, dan PDRB mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Karesidenan Basuki.

Kriteria Pengujian :

- Jika probabilitas F_{hitung} lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) = 5%, maka H_0 ditolak H_a diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara jumlah

penduduk, UMKM, dan PDRB terhadap penerimaan pajak daerah Karesidenan Basuki.

- b) Jika probabilitas F_{hitung} lebih besar dari tingkat signifikansi (α) = 5%, maka H_0 diterima H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara jumlah penduduk, UMKM, dan PDRB terhadap penerimaan Pajak daerah Karesidenan Basuki.

3.4.2 Uji t-statistik (Uji Parsial)

Uji-t digunakan untuk menguji signifikansi secara parsial pengaruh jumlah penduduk, UMKM, dan PDRB terhadap penerimaan pajak daerah Karesidenan Basuki (Supranto, 2005:141).

$$t_{hit} = \frac{\beta_i}{S\beta_i}$$

Keterangan:

β_i = koefisien regresi dari X_1, X_2

$S\beta_i$ = standar deviasi

Perumusan Hipotesis:

$H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$, H_0 diterima H_a ditolak artinya secara parsial variabel jumlah penduduk, UMKM, dan PDRB tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Karesidenan Basuki.

$H_a : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$, H_0 ditolak H_a diterima artinya secara parsial variabel jumlah penduduk, UMKM, dan PDRB mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Karesidenan Basuki.

Kriteria Pengujian :

- a) Jika probabilitas t_{hitung} lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) = 5%, H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti ada pengaruh yang signifikan antar variabel jumlah penduduk, UMKM, dan PDRB terhadap penerimaan pajak daerah Karesidenan Basuki.
- b) Jika probabilitas t_{hitung} lebih besar dari tingkat signifikansi (α) = 5%, H_0 diterima H_a ditolak, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antar variabel

jumlah penduduk, UMKM, dan PDRB terhadap penerimaan pajak daerah Karesidenan Basuki.

3.4.3 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, UMKM, dan PDRB terhadap penerimaan pajak daerah Karesidenan Basuki digunakan rumus koefisien determinasi (R^2) (Supranto, 2005:63).

$$R^2 = \frac{b_1 \sum X_1 y + b_2 \sum X_2 y}{\sum y^2}$$

Batas nilai R^2 adalah $0 < R^2 < 1$

Kriteria Pengujian :

- a) Apabila nilai R^2 mendekati 0, berarti persentase pengaruh variabel jumlah penduduk, UMKM, dan PDRB terhadap penerimaan pajak daerah Karesidenan Basuki Kecil.
- b) Apabila nilai R^2 0,5 – 0,7, berarti persentase pengaruh variabel jumlah penduduk, UMKM, dan PDRB terhadap penerimaan pajak daerah Karesidenan Basuki Sedang.
- c) Apabila nilai R^2 mendekati 1, berarti persentase pengaruh variabel jumlah penduduk, UMKM, dan PDRB terhadap penerimaan pajak daerah Karesidenan Basuki besar.

Metode OLS harus memenuhi beberapa persyaratan asumsi klasik yang bertujuan untuk menghasilkan estimasi sampel yang konsisten dalam menggambarkan populasi, antara lain: model yang digunakan adalah linier, data terdistribusi secara normal, tidak ada autokorelasi, tidak ada multikolinieritas dan tidak ada heteroskedastisitas (homoskedastisitas).

3.5 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik disebut juga sebagai uji diagnostik karena uji ini bertujuan untuk mengestimasi model dari tiap variabel baik dependen maupun

independen (Naherawi *et al*, 2006). Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik bertujuan untuk menghasilkan estimator yang linier tidak bias dengan varian yang minimum (*Best Linear Estimator = BLUE*), dimana tidak terdapat masalah regresi lanceng. Pengujian yang harus dilakukan antara lain, uji linearitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas (Wardhono, 2004).

3.5.1 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui adanya gejala korelasi antar serangkaian data penelitian yang di urutkan berdasarkan tuntut waktu (*time series*). Autokorelasi terjadi apabila *error term* dalam periode tertentu berhubungan dengan nilai *error term* sebelumnya (Wardono, 2004). Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji *Breusch-Godfrey* yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah autokorelasi tidak hanya pada *first order* tetapi juga digunakan pada *order* lainnya. Uji BG-LM dapat dilakukan dengan membandingkan nilai X^2 hitung dengan X^2 tabel atau nilai probabilitas dengan α (derajat kepercayaan). Bila X^2 hitung $< X^2$ tabel atau jika nilai probabilitas $> \alpha$ (5%) maka di agnosa menunjukkan tidak toerjadi masalah autokorelasi (Naherowi *et al*, 2006).

3.5.2 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengevaluasi apakah nilai residual dari model yang dibentuk sudah normal atau tidak (Wardono, 2004). Konsep pengujian uji normalitas menggunakan pendekatan *Jarque-berru test* melalui perhitungan skewness dan kurtosis. Pengujian dapat dilakukan dengan cara membandingkan Jarque-Berra X^2 dimana apabila nilai JB hitung $< X^2$ tabel atau apabila nilai probabilitas JB hitung $> \alpha$ (5%) maka residualnya berdistribusi normal (Naherowi *et al*, 2006).

3.5.3 Uji Linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk menghindari terjadinya *specification error*. Uji linearitas dilakukan untuk mendeteksi bentuk model empiris yang digunakan

sudah benar atau tidak dan menguji apakah suatu variabel baru relevan atau tidak dimasukkan dalam model empiris (Naherowi *et al*, 2006). Uji linearitas yang dilakukan menggunakan uji Ramsey (*Ramsey Reset Test*) yang dikembangkan oleh Ramsey tahun 1969 (Insukindro, 2001: 101) dengan membandingkan nilai F-statistik dengan nilai F-tabel. Apabila F-statistik lebih besar dari F-tabel maka model tersebut tidak linear atau dengan membandingkan nilai probabilitasnya dimana apabila nilai probabilitas value lebih kecil dari α (5%) maka dapat dikatakan model tersebut tidak linear (Wardono, 2004).

3.5.4 Uji Multikolinearitas

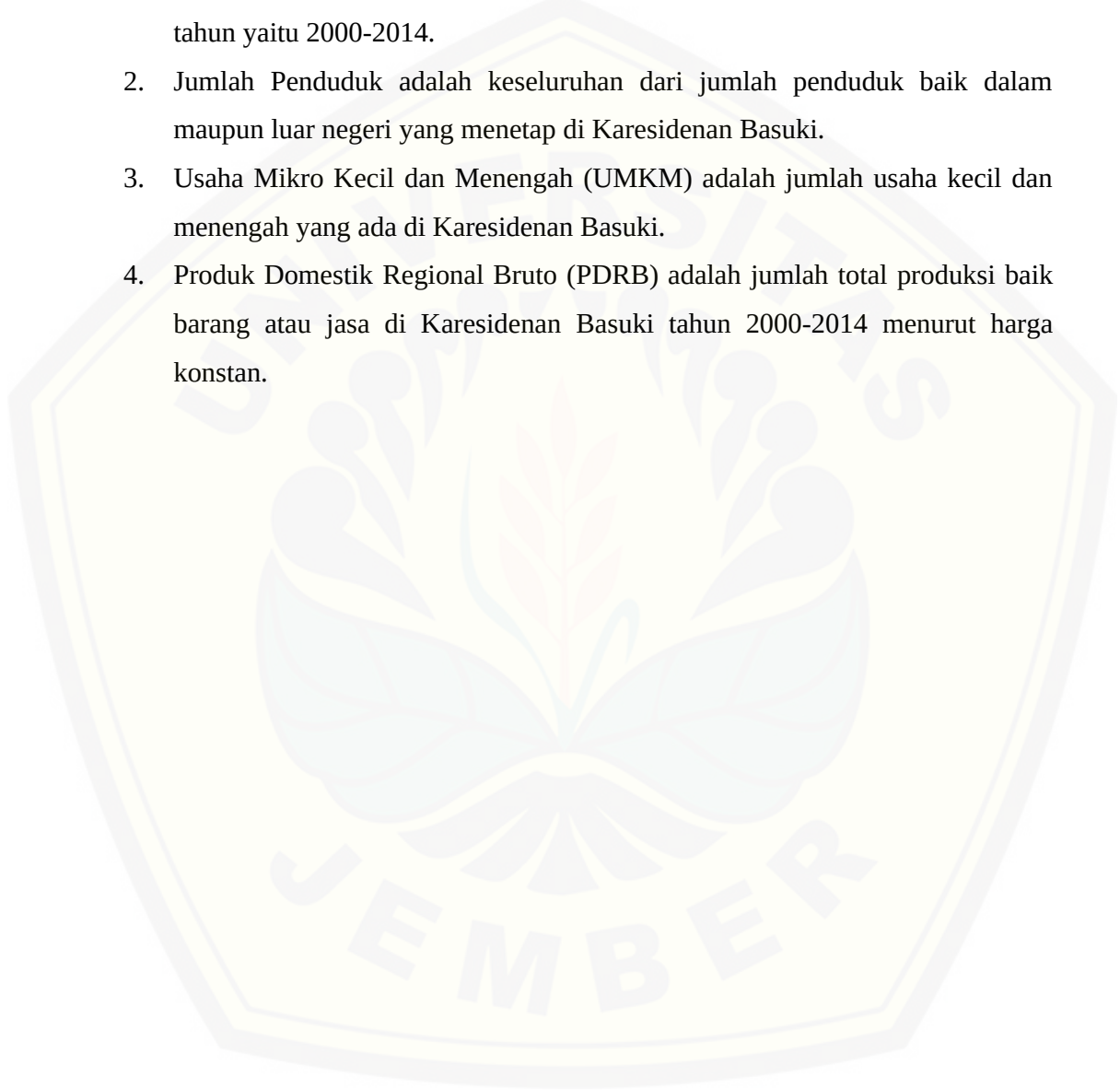
Permasalahan multikolinearitas adalah adanya korelasi linear antar variabel independen dalam model empiris (Wardono, 2004). Uji multikolinearitas dalam penelitian ini di uji dengan menggunakan *correlation matrix*, melalui deteksi korelasi parsial antar variabel independen. *Rule of thumb*, jika koefisien korelasi nilainya $\geq 0,8$ maka diduga ada gejala multikolinearitas dalam variabel. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan linear di antara atau semua variabel independen dari suatu model (Naherowi *et al*, 2006).

3.5.5 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi bila variabel pengganggu mempunyai varian yang tidak konstan atau berubah-ubah (Wardono, 2004). Heteroskedastisitas cenderung menyerang model empiris yang menggunakan data *cross saction* dari pada *time series*. Hal ini terjadi karena perilaku data *time series* fluktuasinya dari waktu ke waktu relative stabil. Heteroskedastisitas muncul apabila residual dari model yang di amati tidak memiliki varians yang konstan dari satu observasi lainnya. Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji *white heteroskedasticity* dengan cara membandingkan nilai X^2 hitung dengan X^2 tabel. Dimana apabila X^2 hitung < daripada X^2 tabel atau apabila $\text{Obs} \cdot \text{Rsquared} > \alpha$ (5%), maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas (Nahrowi *et al*, 2006).

3.6 Definisi Operasional

1. Penerimaan Pajak daerah Karesidenan Basuki adalah Penerimaan Pajak total dari beberapa jenis pajak yang dikenakan seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak bumi bangunan, dan sebagainya, berdasarkan peraturan daerah (PERDA) yang berlaku di Karesidenan Basuki selama kurun waktu 15 tahun yaitu 2000-2014.
2. Jumlah Penduduk adalah keseluruhan dari jumlah penduduk baik dalam maupun luar negeri yang menetap di Karesidenan Basuki.
3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah jumlah usaha kecil dan menengah yang ada di Karesidenan Basuki.
4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah total produksi baik barang atau jasa di Karesidenan Basuki tahun 2000-2014 menurut harga konstan.



BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab 5 akan diuraikan kesimpulan penelitian mengenai analisis pengaruh Jumlah Penduduk, UMKM, PDRB terhadap Penerimaan Pajak daerah karesidenan Basuki tahun 2000-2014 dari hasil regresi linear data panel dengan model *Fixed effect*. Selain itu, dalam bab ini akan diuraikan saran mengenai agar penerimaan pajak daerah karesidenan Basuki setiap tahunnya semakin meningkat.

5.1 Kesimpulan

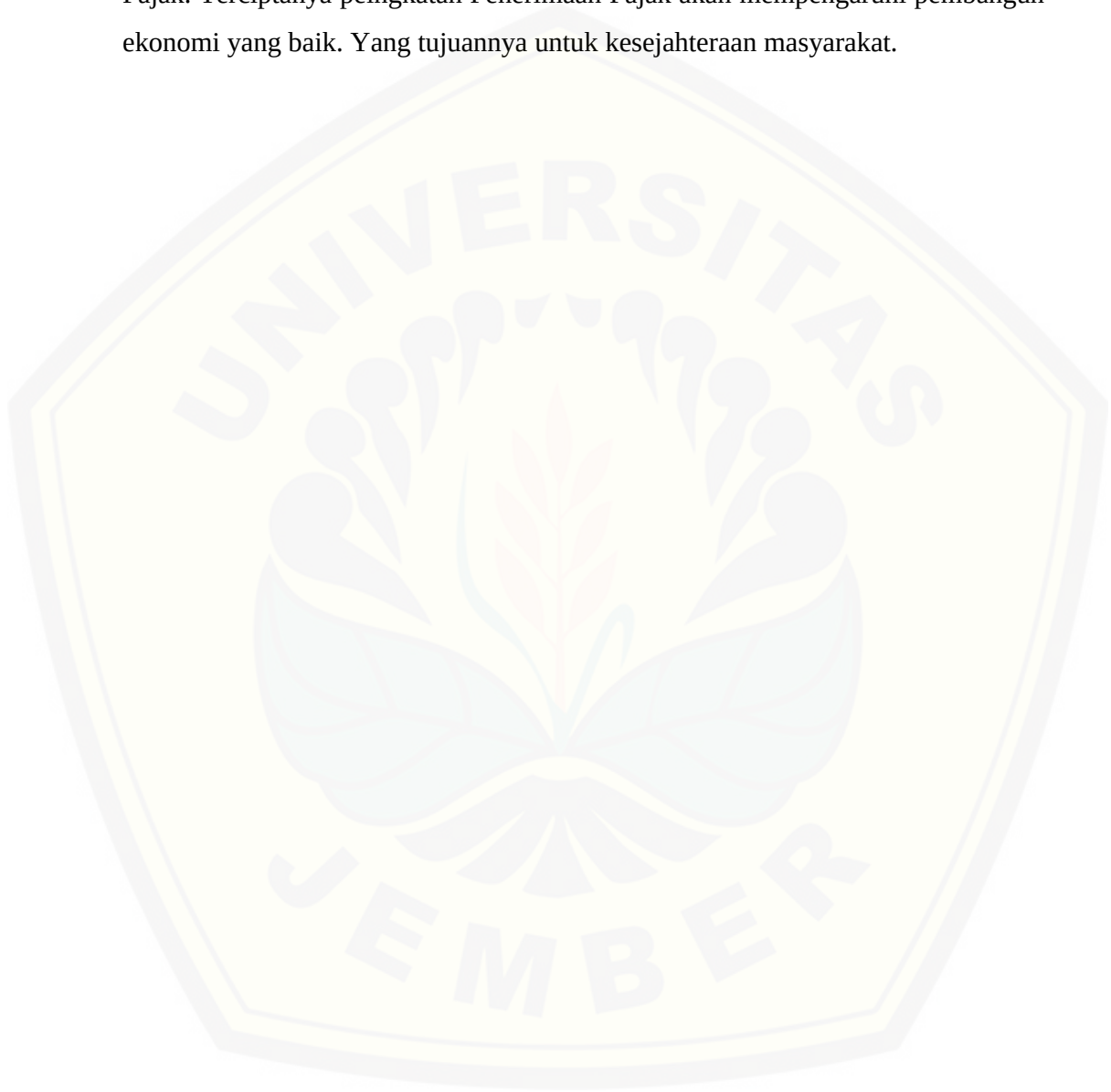
1. Variabel PDDK dan UMKM signifikan mempengaruhi besarnya Pajak dengan nilai t-hitung lebih besar daripada t-tabel. Selain itu dengan melihat probabilitas t-hitung dari kedua variabel independen yaitu 0.0000 dan 0.0002 yang menunjukkan nilai lebih kecil dibandingkan dengan α ($\alpha = 5\% = 0,0500$). Bahwa besarnya Penerimaan Pajak (PAJAK) dipengaruhi secara signifikan oleh Jumlah Penduduk (PDDK), Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) secara parsial.

Variabel PDRB tidak signifikan mempengaruhi Penerimaan Pajak (PAJAK) dengan nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel. Selain itu, dengan melihat probabilitas t-hitung dari variabel PDRB yaitu 0.1290 yang menunjukkan nilai lebih besar dibandingkan dengan α ($\alpha = 5\% = 0.0500$). Dengan demikian variabel PDRB tidak signifikan dalam mempengaruhi Penerimaan Pajak (PAJAK) secara parsial.

2. Pada pengujian serentak, hasil menunjukkan bahwa secara keseluruhan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap besarnya Penerimaan Pajak yang terlihat dari F-hitung yang lebih besar dari pada F-tabel serta probabilitas F-hitung dengan nilai 0.000000 yang menunjukkan nilai lebih kecil dibandingkan dengan α ($\alpha = 5\% = 0.0500$).

5.2 Saran

Kabupaten-kabupaten yang termasuk di daerah karesidenan Basuki perlu menyusun strategi kebijakan yang lebih dapat mendorong kenaikan Penerimaan Pajak. Terciptanya peningkatan Penerimaan Pajak akan mempengaruhi pembangun ekonomi yang baik. Yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat.



DAFTAR BACAAN

- Aimon, H, Wardi, Y & Silvia, E. D. 2013. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Inflasi di Indonesia*. Jurnal Kajian Ekonomi. Januari 2013, Vol. I, No. 02.
- Arsyad, Lincolyn. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi daerah*. BPFE: Yogyakarta.
- BPS Kabupaten Jember, 2013, Jember.
- BPS Kabupaten Jember, 2014, Jember.
- BPS Kabupaten Jember, 2016, Jember.
- BPS Kabupaten Banyuwangi, 2013, Banyuwangi.
- BPS Kabupaten Banyuwangi, 2014, Banyuwangi.
- BPS Kabupaten Banyuwangi, 2016, Banyuwangi.
- BPS Kabupaten Situbondo, 2013, Situbondo.
- BPS Kabupaten Situbondo, 2014, Situbondo.
- BPS Kabupaten Situbondo, 2016, Situbondo.
- BPS Kabupaten Bondowoso, 2013, Bondowoso.
- BPS Kabupaten Bondowoso, 2014, Bondowoso.
- BPS Kabupaten Bondowoso, 2016, Bondowoso.
- Chairany. 2010. *Pertumbuhan Penduduk dan Lingkungannya*. [http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19103/3/Chapter %20II.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19103/3/Chapter%20II.pdf). Universitas Sumatra Utara: Medan. [Diakses 27 Februari 2015].
- Cottarelli, Carlo. 2011. *Revenue Mobilization in Development Countries*. <http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2011/030811.pdf>. Prepared by the Fiscal Affairs Department: Internasional Monetary Fund. [diakses 24 Februari 2015].
- Daniel. A., 2010. *Micro, Small and Medium Enterprises' Activities, Income Level and Poverty Reduction in Ghana – A Synthesis of Related Literature*. <http://www.google.com/url?>

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.research



- hgate.net%2Fprofile%2FDaniel_Agyapong%2Fpublication%2F49586572_Micro_Small_and_Medium_Enterprises_Activities_Income_Level_and_Poverty_Reduction_in_Ghana_A_Synthesis_of_Related_Literature%2Flinks%2F02e7e5275ca0a86ebc000000.pdf&ei=-AbsVOmaJM2UuATdt4L4Ag&usg=AFQjCNErNl-xmrRQ2pdbF28kP8jFCDEgKw&bvm=bv.86475890,d.c2E. Departement of Menagement Studies, School of Business. University of Coast, Cape Coast: Ghana. [diakses 24 Februari 2015].
- Disperindag. 2002. *Strategi Pembangunan Industri 2002*. Jakarta.
- Ghafir, 2000, *Perpajakan*, BPFE. Yogyakarta.
- Hossin; Akbar dan Chowdry; Anis. 1998. *Open Economy Macro economics for Developing Counatryes*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Insukindro, 1994, *Ekonomi Moneter dan Prakteknya*. BPFE Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Irawan dan Suparmuko. 2002. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi ke enam. Fak. Ekonomi UGM. Yogyakarta.
- Mardiasmo dan Makhfatih. 2000. *Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi daerah serta Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. ANDI.Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. ANDI.Yogyakarta.
- Musgrave, R. A. & Musgrave, P. B. 1993.*Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek, edisi V*. alih Bahasa Alfonsus Sirait.Erlangga. Jakarta.
- Nasution, C. S. 2003. *Analisis Potensi dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) di Indonesia Periode: 1990 - 2000*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan. Volume 7, Nomor 2. Jakarta.
- Nopirin, Phd., 1990. *Ekonomi Moneter*. Buku Satu. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFEUGM.
- Pheni, chalid. 2005. *Otonomi Daerh (Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik)*. Partnership for Governance Reform. Jakarta.

- Piliang, Indra J, dkk (ed.). 2003. *Otonomi Daerah, Evaluasi dan Proyeksi*, Jakarta, Yayasan Harkat Bangsa bekerjasama dengan Partnership Governance Reform Indonesia.
- Raharja, D. 1984. *Tranformasi Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja*. Jakarta: LPFE-UI.
- Rahmanta. 2011. *Pengaruh Prdsuk Domestik Bruto dan SBI Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia*. http://qejournal.unimed.ac.id/edisi/epdf/1/QEJ_vol01.Rahmanta.pdf. Departemen Agribisnis. Sumatra Utara.
- Rao, Govinda, M., 2013. *Property Tax System in India: Problems and Prospects of Reform*. http://www.nipfp.org.in/media/medialibrary/2013/04/WP-2013_114.pdf. National Institut of Public Finance and Policy. [diakses 24 Februari 2015].
- Rofik, M., 2011, *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Industri Besar dan Sedang, dan PDRB terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sumenep*, FEB UMM, Malang.
- Rumyati. 2012. *Spesialisasi dan Konsentrasi Spasial Industri Kecil Menengah di Kabupaten Bondowoso (2006-2010)*. Skripsi. Universitas Jember.
- Saefuddin. 2008. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai di Sumatera Utara*. Tesis program pasca sarjana Magister Ekonomi pembangunan USU. Medan.
- Siahaan. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Situngkir, A., 2009. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemkot/Pemkab Sumatra Utara*. Program Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara: Medan.
- Sukirno, Sadono. 1996. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Ke-2. Jakarta: Erlangga.
- Sukirno, Sadono. 2002. *Pengantar Makro Ekonomi Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah, Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suparmuko dan Darmayanti, T. W. 2005. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungannya*. Andi. Yogyakarta.
- Supranto, J. 2005. *Ekonometrika*. Jakarta: LPFE-UI.
- Todaro, M. P., Smith. S. C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Todaro, M.P., 2004. *Economic Development*. Seventh Edition. New York: Addition Wesley Longman Inc.
- Tri, T. P. 2009. *Analisis Dampak Defisit Anggaran Terhadap Ekonomi Makro Indonesia (1993 – 2007)*. Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen, vol. 20, no. 02, halaman: 124 – 134.
- Undang-undang, 2008, *Tentang Kriteria UMKM*.
- Undang-undang, 2009, *Penggolongan Pajak Daerah*.
- Universitas Jember. 2010. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- Waluyo dan Ilyas B. 2007. *Perpajakan Indonesia, Edisi Ketujuh*. Salemba Empat. Jakarta.
- Wardhono, A. *Mengenal Ekonometrika, Edisi Pertama*. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Widodo, Agus. W.,. 2011. *Pengaruh Pajak daerah dan Retribusi Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember*. Universitas Jember. Jember.

Lampiran 1. Data Penelitian

a. Data Kabupaten Jember

Tahun	Pajak	Penduduk (PDDK)	PDRB	UMKM
2000	5.408.901,87	2.105.132	5.773.954	644
2001	7.161.839,63	2.120.074	6.668.462	658
2002	9.796.813,16	2.123.968	7.717.205	900
2003	11.288.805,29	2.131.289	7.473.399	993
2004	10.874.598,82	2.136.999	7.821.292	1164
2005	16.311.036,16	2.141.467	8.236.276	1376
2006	19.178.932,83	2.146.571	8.705.996	1608
2007	21.533.246,97	2.153.883	9.226.767	1784
2008	24.222.730,28	2.168.732	9.783.828	2035
2009	26.471.756,84	2.179.829	10.891.607	2320
2010	30.841.171,43	2.332.726	11.550.549	2619
2011	40.708.373,39	2.345.851	12.359.522	2918
2012	55.628.583,94	2.355.283	13.250.979	2851
2013	95.188.144,41	2.394.608	14.165.901	3040
2014	116.578.557,51	2.529.967	16.342.726	3154

b. Data Kabupaten Situbondo

Tahun	Pajak	Penduduk (PDDK)	PDRB	UMKM
2000	4167213.76	603705	1794620.34	351
2001	9768127.99	611695	1876920.67	572
2002	19791523.53	616854	2372999.54	755
2003	21304842.13	621854	2468599.58	804
2004	27407567.46	626599	2573128.01	908
2005	32665495.19	631381	2703988.41	1112
2006	33153295.73	636199	2852394.95	1369
2007	35883611.33	638537	3014205.64	1637
2008	36471451.79	640882	3167290.94	1854
2009	38971639.44	643061	3330419.50	1997
2010	41120783.15	647619	3522055.33	2261
2011	43809625.84	652042	5721603.17	2391
2012	46674733.31	656691	9411602.14	2535
2013	50152742.45	660702	9993859.26	2686
2014	54715426.91	666013	10572377.71	2943

c. Data Kabupaten Bondowoso

Tahun	Pajak	Penduduk (PDDK)	PDRB	UMKM
2000	1240275.42	674725	5895801.15	321
2001	1685232.25	688344	8436125.32	398
2002	1925469.56	692716	11724815.27	518
2003	2564257.95	696049	13025432.81	625
2004	3434303.76	699188	13760250.74	726
2005	5718074.97	705659	14625966.29	817
2006	8256875.21	708683	15924152.15	925
2007	13617919.33	723157	17634833.87	1032
2008	16230451.81	737807	19714898.45	1103
2009	18258596.82	739291	21844020.08	1291
2010	20156076.82	740737	31416982.26	1364
2011	23092480.79	745267	33419664.11	1514
2012	27079064.47	748948	35527683.76	1677
2013	31206732.32	752800	37805374.42	1745
2014	36246158.81	764252	39349527.51	1943

d. Data Kabupaten Banyuwangi

Tahun	Pajak	Penduduk (PDDK)	PDRB	UMKM
2000	5125901.87	1488791	11279947.6	467
2001	6763821.45	1496811	14760803.6	498
2002	9372142.73	1511225	16204118.4	589
2003	11562861.53	1523917	18455197.1	675
2004	12945529.95	1530161	20977552.2	818
2005	15285165.34	1533821	22994634.7	953
2006	17856339.14	1535562	24193574.1	1127
2007	20461883.23	1539341	26431276.2	1364
2008	23182681.56	1543814	28255867.1	1442
2009	25749236.11	1546274	30656712.9	1684
2010	29184288.99	1559088	32463822.6	1929
2011	40384114.63	1567084	34720429.5	2251
2012	53819327.66	1574528	37235736.2	2596
2013	87452954.31	1582586	39733619.7	2891
2014	98461452.05	1588082	42005651.6	3012

Dependent Variable: PAJAK
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/13/17 Time: 15:02
 Sample: 2000 2014
 Periods included: 15
 Cross-sections included: 4
 Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PDDK	143.3713	28.83075	4.972861	0.0000
PDRB	0.427447	0.277187	1.542088	0.1290
UMKM	13438.34	3386.794	3.967866	0.0002
C	-1.83E+08	34567386	-5.294217	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.843704	Mean dependent var	27592854
Adjusted R-squared	0.826010	S.D. dependent var	24361094
S.E. of regression	10161513	Akaike info criterion	35.21539
Sum squared resid	5.47E+15	Schwarz criterion	35.45973
Log likelihood	-1049.462	Hannan-Quinn criter.	35.31097
F-statistic	47.68347	Durbin-Watson stat	0.528624
Prob(F-statistic)	0.000000		

1. Uji Asumsi Klasik Kabupaten Jember

a. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

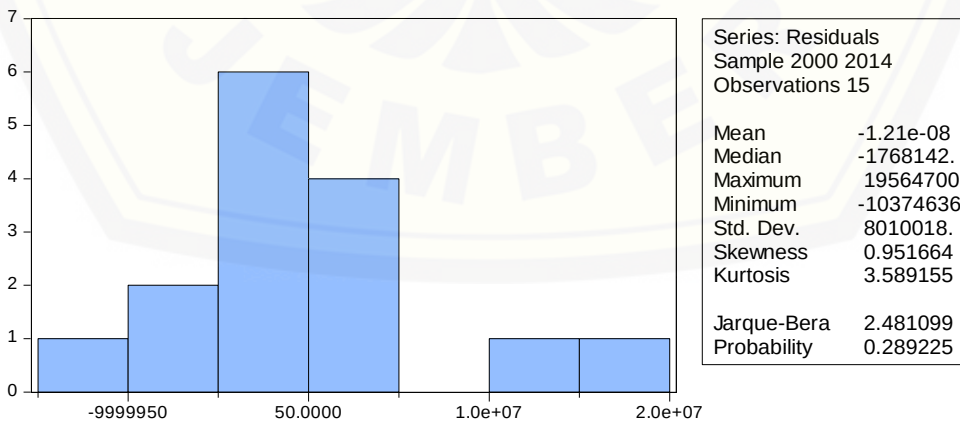
F-statistic	0.189126	Prob. F(2,9)	0.8309
Obs*R-squared	0.604993	Prob. Chi-Square(2)	0.7390

Test Equation:
 Dependent Variable: RESID
 Method: Least Squares
 Date: 12/17/17 Time: 17:45
 Sample: 2000 2014
 Included observations: 15
 Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PDDK	-12.34832	77.89858	-0.158518	0.8775
PDRB	0.235423	6.004610	0.039207	0.9696
UMKM	149.0301	13570.10	0.010982	0.9915
C	24448681	1.38E+08	0.177669	0.8629
RESID(-1)	-0.007245	0.391297	-0.018515	0.9856
RESID(-2)	-0.307532	0.503807	-0.610417	0.5567

R-squared	0.040333	Mean dependent var	-1.21E-08
Adjusted R-squared	-0.492816	S.D. dependent var	8010018.
S.E. of regression	9786706.	Akaike info criterion	35.32012
Sum squared resid	8.62E+14	Schwarz criterion	35.60334
Log likelihood	-258.9009	Hannan-Quinn criter.	35.31711
F-statistic	0.075650	Durbin-Watson stat	1.986815
Prob(F-statistic)	0.994505		

b. Uji Normalitas



c. Uji Linearitas

Ramsey RESET Test

Equation: UNTITLED
 Specification: PAJAK PDDK PDRB UMKM C
 Omitted Variables: Squares of fitted values

	Value	df	Probability
t-statistic	1.542757	10	0.1539
F-statistic	2.380099	(1, 10)	0.1539
Likelihood ratio	3.202577	1	0.0735

F-test summary:

	Sum of Sq.	df	Mean Squares
Test SSR	1.73E+14	1	1.73E+14
Restricted SSR	8.98E+14	11	8.17E+13
Unrestricted SSR	7.26E+14	10	7.26E+13
Unrestricted SSR	7.26E+14	10	7.26E+13

LR test summary:

	Value	df
Restricted LogL	-259.2097	11
Unrestricted LogL	-257.6084	10

Unrestricted Test Equation:
 Dependent Variable: PAJAK
 Method: Least Squares
 Date: 12/17/17 Time: 17:52
 Sample: 2000 2014
 Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PDDK	-5.563120	74.29782	-0.074876	0.9418
PDRB	7.378021	8.151971	0.905060	0.3867
UMKM	-5316.544	21085.15	-0.252146	0.8060
C	-27608831	1.57E+08	-0.175664	0.8641
FITTED^2	4.42E-09	2.86E-09	1.542757	0.1539

R-squared	0.951876	Mean dependent var	32746233
Adjusted R-squared	0.932626	S.D. dependent var	32816341
S.E. of regression	8517957.	Akaike info criterion	35.01445
Sum squared resid	7.26E+14	Schwarz criterion	35.25047
Log likelihood	-257.6084	Hannan-Quinn criter.	35.01194
F-statistic	49.44904	Durbin-Watson stat	2.341740
Prob(F-statistic)	0.000001		

d. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.590088	Prob. F(9,5)	0.3170
Obs*R-squared	11.11616	Prob. Chi-Square(9)	0.2678
Scaled explained SS	7.739016	Prob. Chi-Square(9)	0.5606

Test Equation:
 Dependent Variable: RESID^2
 Method: Least Squares
 Date: 12/17/17 Time: 17:56
 Sample: 2000 2014
 Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.93E+16	1.97E+17	0.301716	0.7750
PDDK	-7.00E+10	1.92E+11	-0.363669	0.7310
PDDK^2	20765.14	46353.07	0.447978	0.6729
PDDK*PDRB	-5008.602	3196.715	-1.566797	0.1779
PDDK*UMKM	13150359	8065164.	1.630514	0.1639
PDRB	9.18E+09	6.07E+09	1.512107	0.1909
PDRB^2	102.2078	272.6095	0.374924	0.7231
PDRB*UMKM	17723.07	1403328.	0.012629	0.9904
UMKM	-2.63E+13	1.33E+13	-1.985610	0.1038
UMKM^2	-8.24E+08	1.78E+09	-0.462142	0.6634

R-squared	0.741077	Mean dependent var	5.99E+13
Adjusted R-squared	0.275017	S.D. dependent var	9.97E+13
S.E. of regression	8.49E+13	Akaike info criterion	67.21814
Sum squared resid	3.61E+28	Schwarz criterion	67.69018
Log likelihood	-494.1361	Hannan-Quinn criter.	67.21312
F-statistic	1.590088	Durbin-Watson stat	2.600537
Prob(F-statistic)	0.316971		

e. Uji Multikolonieritas

	PDDK	PDRB	UMKM
PDDK	1.000000	0.958006	0.895067
PDRB	0.958006	1.000000	0.962594
UMKM	0.895067	0.962594	1.000000

2. Uji Asumsi Klasik Kabupaten Situbondo

a. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	4.658505	Prob. F(2,9)	0.0409
Obs*R-squared	7.629801	Prob. Chi-Square(2)	0.0220

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 12/17/17 Time: 18:10

Sample: 2000 2014

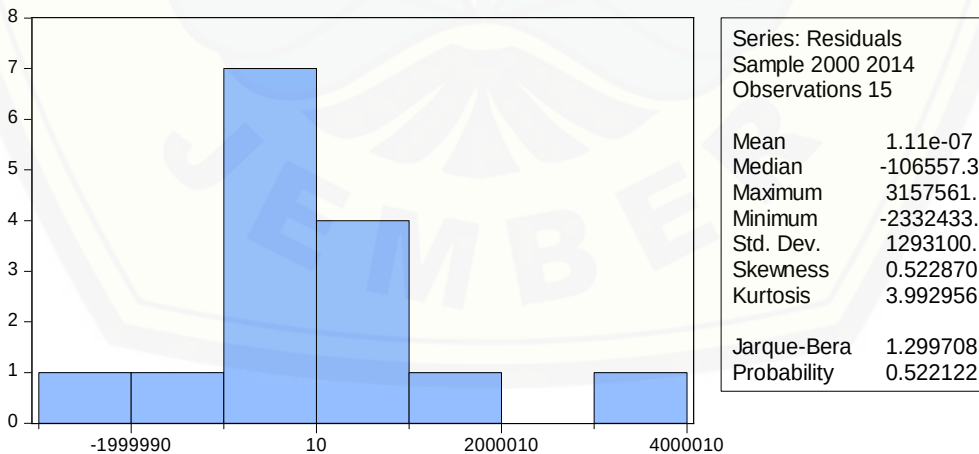
Included observations: 15

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PDDK	92.46505	100.2024	0.922783	0.3802
PDRB	-0.139993	0.190355	-0.735430	0.4808
UMKM	-1675.733	2172.308	-0.771406	0.4602
C	-55615709	60353041	-0.921506	0.3808
RESID(-1)	-0.945039	0.310969	-3.039010	0.0140
RESID(-2)	-0.527608	0.308085	-1.712539	0.1210

R-squared	0.508653	Mean dependent var	1.11E-07
Adjusted R-squared	0.235683	S.D. dependent var	1293100.
S.E. of regression	1130495.	Akaike info criterion	31.00338
Sum squared resid	1.15E+13	Schwarz criterion	31.28660
Log likelihood	-226.5254	Hannan-Quinn criter.	31.00037
F-statistic	1.863402	Durbin-Watson stat	2.182286
Prob(F-statistic)	0.196600		

b. Uji Normalitas



c. Uji Linieritas

Ramsey RESET Test

Equation: UNTITLED

Specification: PAJAK PDDK PDRB UMKM C
 Omitted Variables: Squares of fitted values

	Value	df	Probability
t-statistic	0.580078	10	0.5747
F-statistic	0.336491	(1, 10)	0.5747
Likelihood ratio	0.496430	1	0.4811

F-test summary:

	Sum of Sq.	df	Mean Squares
Test SSR	7.62E+11	1	7.62E+11
Restricted SSR	2.34E+13	11	2.13E+12
Unrestricted SSR	2.26E+13	10	2.26E+12
Unrestricted SSR	2.26E+13	10	2.26E+12

LR test summary:

	Value	df
Restricted LogL	-231.8549	11
Unrestricted LogL	-231.6067	10

Unrestricted Test Equation:
 Dependent Variable: PAJAK
 Method: Least Squares
 Date: 12/17/17 Time: 18:13
 Sample: 2000 2014
 Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PDDK	1303.126	193.3737	6.738901	0.0001
PDRB	-0.392370	0.367053	-1.068974	0.3102
UMKM	-7620.586	2873.520	-2.652003	0.0242
C	-7.79E+08	1.18E+08	-6.624981	0.0001
FITTED^2	-2.70E-09	4.65E-09	-0.580078	0.5747

R-squared	0.992205	Mean dependent var	33070539
Adjusted R-squared	0.989086	S.D. dependent var	14405412
S.E. of regression	1504907.	Akaike info criterion	31.54756
Sum squared resid	2.26E+13	Schwarz criterion	31.78358
Log likelihood	-231.6067	Hannan-Quinn criter.	31.54505
F-statistic	318.2010	Durbin-Watson stat	3.173911
Prob(F-statistic)	0.000000		

d. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.571962	Prob. F(9,5)	0.7803
-------------	----------	--------------	--------

Obs*R-squared	7.609132	Prob. Chi-Square(9)	0.5740
Scaled explained SS	6.123622	Prob. Chi-Square(9)	0.7275

Test Equation:
 Dependent Variable: RESID^2
 Method: Least Squares
 Date: 12/17/17 Time: 18:14
 Sample: 2000 2014
 Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.33E+15	7.91E+16	0.079974	0.9394
PDDK	-2.11E+10	2.62E+11	-0.080216	0.9392
PDDK^2	17529.83	217702.1	0.080522	0.9389
PDDK*PDRB	134.2210	1521.420	0.088221	0.9331
PDDK*UMKM	-2083508.	11311096	-0.184200	0.8611
PDRB	-89228085	9.14E+08	-0.097585	0.9261
PDRB^2	-0.762137	1.434753	-0.531198	0.6180
PDRB*UMKM	5778.673	28680.07	0.201487	0.8483
UMKM	1.28E+12	6.86E+12	0.186566	0.8593
UMKM^2	16474794	1.21E+08	0.135651	0.8974
R-squared	0.507275	Mean dependent var	1.56E+12	
Adjusted R-squared	-0.379629	S.D. dependent var	2.79E+12	
S.E. of regression	3.28E+12	Akaike info criterion	60.71189	
Sum squared resid	5.39E+25	Schwarz criterion	61.18393	
Log likelihood	-445.3392	Hannan-Quinn criter.	60.70687	
F-statistic	0.571962	Durbin-Watson stat	2.214215	
Prob(F-statistic)	0.780286			

e. Uji Multikolonieritas

	PDDK	PDRB	UMKM
PDDK	1.000000	0.837080	0.984450
PDRB	0.837080	1.000000	0.841276
UMKM	0.984450	0.841276	1.000000

3. Uji Asumsi Klasik Kabupaten Bondowoso

a. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	5.813536	Prob. F(2,9)	0.0239
Obs*R-squared	8.455203	Prob. Chi-Square(2)	0.0146

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 12/17/17 Time: 18:22

Sample: 2000 2014

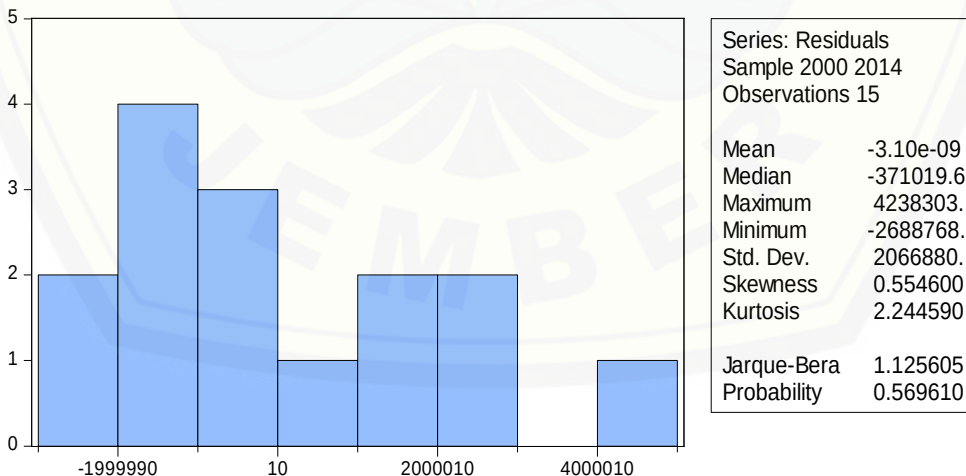
Included observations: 15

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PDDK	-105.0785	93.51721	-1.123627	0.2902
PDRB	0.010982	0.246673	0.044521	0.9655
UMKM	5316.386	8728.665	0.609072	0.5575
C	69876089	61922236	1.128449	0.2883
RESID(-1)	1.009165	0.297767	3.389110	0.0080
RESID(-2)	-0.615555	0.347513	-1.771314	0.1103

R-squared	0.563680	Mean dependent var	-3.10E-09
Adjusted R-squared	0.321280	S.D. dependent var	2066880.
S.E. of regression	1702788.	Akaike info criterion	31.82261
Sum squared resid	2.61E+13	Schwarz criterion	32.10583
Log likelihood	-232.6695	Hannan-Quinn criter.	31.81959
F-statistic	2.325415	Durbin-Watson stat	1.910620
Prob(F-statistic)	0.128225		

b. Uji Normalitas



c. Uji Linieritas

Ramsey RESET Test

Equation: UNTITLED
 Specification: PAJAK PDDK PDRB UMKM C
 Omitted Variables: Squares of fitted values

	Value	df	Probability
t-statistic	6.252734	10	0.0001
F-statistic	39.09669	(1, 10)	0.0001
Likelihood ratio	23.86810	1	0.0000

F-test summary:

	Sum of Sq.	df	Mean Squares
Test SSR	4.76E+13	1	4.76E+13
Restricted SSR	5.98E+13	11	5.44E+12
Unrestricted SSR	1.22E+13	10	1.22E+12
Unrestricted SSR	1.22E+13	10	1.22E+12

LR test summary:

	Value	df
Restricted LogL	-238.8899	11
Unrestricted LogL	-226.9558	10

Unrestricted Test Equation:
 Dependent Variable: PAJAK
 Method: Least Squares
 Date: 12/17/17 Time: 18:24
 Sample: 2000 2014
 Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PDDK	206.6888	60.43566	3.419981	0.0065
PDRB	-0.204845	0.147879	-1.385222	0.1961
UMKM	2129.029	5204.600	0.409067	0.6911
C	-1.39E+08	39622656	-3.519202	0.0055
FITTED^2	2.04E-08	3.26E-09	6.252734	0.0001
R-squared	0.993622	Mean dependent var		14047465
Adjusted R-squared	0.991071	S.D. dependent var		11680450
S.E. of regression	1103706.	Akaike info criterion		30.92745
Sum squared resid	1.22E+13	Schwarz criterion		31.16346
Log likelihood	-226.9558	Hannan-Quinn criter.		30.92493
F-statistic	389.4951	Durbin-Watson stat		1.625138
Prob(F-statistic)	0.000000			

d. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	19.49188	Prob. F(9,5)	0.0022
Obs*R-squared	14.58432	Prob. Chi-Square(9)	0.1030
Scaled explained SS	4.880735	Prob. Chi-Square(9)	0.8446

Test Equation:
 Dependent Variable: RESID^2
 Method: Least Squares
 Date: 12/17/17 Time: 18:25
 Sample: 2000 2014
 Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.95E+15	6.80E+15	-0.287312	0.7854
PDDK	7.31E+09	2.05E+10	0.356392	0.7361
PDDK^2	-6533.526	15480.36	-0.422053	0.6905
PDDK*PDRB	96.05918	47.74580	2.011888	0.1004
PDDK*UMKM	296831.4	2347216.	0.126461	0.9043
PDRB	-68922142	31792223	-2.167893	0.0824
PDRB^2	-0.229740	0.141001	-1.629345	0.1642
PDRB*UMKM	7811.781	6685.621	1.168445	0.2953
UMKM	-5.96E+10	1.54E+12	-0.038621	0.9707
UMKM^2	-1.47E+08	1.33E+08	-1.105455	0.3193

R-squared	0.972288	Mean dependent var	3.99E+12
Adjusted R-squared	0.922406	S.D. dependent var	4.60E+12
S.E. of regression	1.28E+12	Akaike info criterion	58.83235
Sum squared resid	8.22E+24	Schwarz criterion	59.30438
Log likelihood	-431.2426	Hannan-Quinn criter.	58.82732
F-statistic	19.49188	Durbin-Watson stat	1.854105
Prob(F-statistic)	0.002221		

e. Uji Multikolonieritas

	PDDK	PDRB	UMKM
PDDK	1.000000	0.946087	0.979394
PDRB	0.946087	1.000000	0.978637
UMKM	0.979394	0.978637	1.000000

4. Uji Asumsi Klasik Kabupaten Banyuwangi

a. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	3.983328	Prob. F(2,9)	0.0577
Obs*R-squared	7.043217	Prob. Chi-Square(2)	0.0296

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 12/17/17 Time: 18:30

Sample: 2000 2014

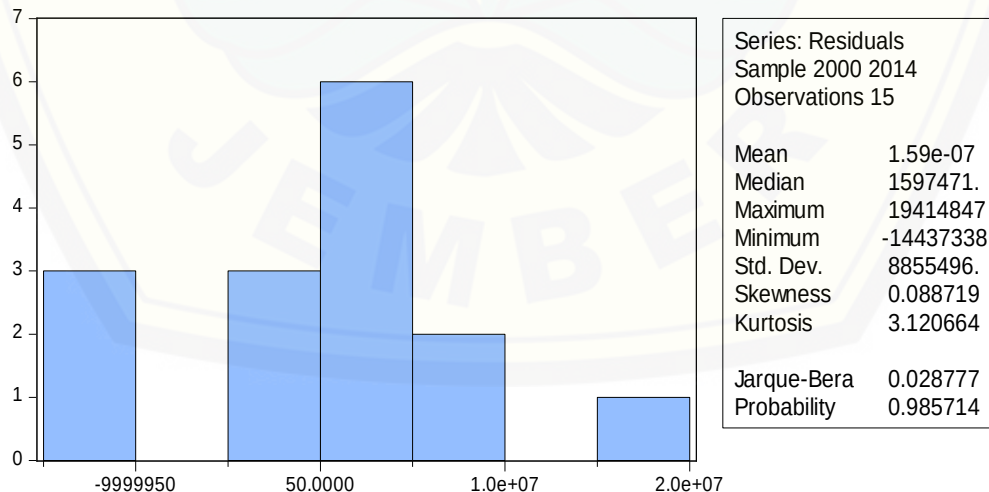
Included observations: 15

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PDDK	0.872410	504.4357	0.001729	0.9987
PDRB	0.973590	2.455978	0.396416	0.7010
UMKM	-14096.46	20614.24	-0.683822	0.5113
C	-7575751.	7.33E+08	-0.010336	0.9920
RESID(-1)	0.631892	0.373760	1.690636	0.1252
RESID(-2)	-1.098213	0.642169	-1.710162	0.1214

R-squared	0.469548	Mean dependent var	1.59E-07
Adjusted R-squared	0.174852	S.D. dependent var	8855496.
S.E. of regression	8044125.	Akaike info criterion	34.92796
Sum squared resid	5.82E+14	Schwarz criterion	35.21118
Log likelihood	-255.9597	Hannan-Quinn criter.	34.92494
F-statistic	1.593331	Durbin-Watson stat	2.374659
Prob(F-statistic)	0.255949		

b. Uji Normalitas



c. Uji Linieritas

Ramsey RESET Test

Equation: UNTITLED
 Specification: PAJAK PDDK PDRB UMKM C
 Omitted Variables: Squares of fitted values

	Value	df	Probability
t-statistic	5.214542	10	0.0004
F-statistic	27.19145	(1, 10)	0.0004
Likelihood ratio	19.70241	1	0.0000

F-test summary:

	Sum of Sq.	df	Mean Squares
Test SSR	8.03E+14	1	8.03E+14
Restricted SSR	1.10E+15	11	9.98E+13
Unrestricted SSR	2.95E+14	10	2.95E+13
Unrestricted SSR	2.95E+14	10	2.95E+13

LR test summary:

	Value	df
Restricted LogL	-260.7149	11
Unrestricted LogL	-250.8637	10

Unrestricted Test Equation:
 Dependent Variable: PAJAK
 Method: Least Squares
 Date: 12/17/17 Time: 18:32
 Sample: 2000 2014
 Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PDDK	-702.9641	428.6741	-1.639857	0.1321
PDRB	6.624433	2.693404	2.459502	0.0337
UMKM	-61048.88	25246.57	-2.418106	0.0362
C	9.99E+08	6.18E+08	1.615055	0.1374
FITTED^2	1.81E-08	3.48E-09	5.214542	0.0004
R-squared	0.974093	Mean dependent var		30507180
Adjusted R-squared	0.963730	S.D. dependent var		28528503
S.E. of regression	5433196.	Akaike info criterion		34.11515
Sum squared resid	2.95E+14	Schwarz criterion		34.35117
Log likelihood	-250.8637	Hannan-Quinn criter.		34.11264
F-statistic	93.99734	Durbin-Watson stat		1.620563
Prob(F-statistic)	0.000000			

d. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	10.51543	Prob. F(9,5)	0.0093
Obs*R-squared	14.24728	Prob. Chi-Square(9)	0.1138
Scaled explained SS	8.124126	Prob. Chi-Square(9)	0.5217

Test Equation:
 Dependent Variable: RESID^2
 Method: Least Squares
 Date: 12/17/17 Time: 18:33
 Sample: 2000 2014
 Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.50E+18	1.75E+18	-0.857082	0.4306
PDDK	2.16E+12	2.42E+12	0.892612	0.4130
PDDK^2	-779059.7	839870.2	-0.927595	0.3962
PDDK*PDRB	16399.50	9756.997	1.680793	0.1536
PDDK*UMKM	-1.42E+08	79871310	-1.772596	0.1365
PDRB	-2.33E+10	1.40E+10	-1.663656	0.1571
PDRB^2	-60.51151	28.38980	-2.131453	0.0862
PDRB*UMKM	862149.4	338135.3	2.549717	0.0513
UMKM	2.03E+14	1.16E+14	1.750328	0.1405
UMKM^2	-2.48E+09	6.21E+08	-4.001518	0.0103
R-squared	0.949819	Mean dependent var	7.32E+13	
Adjusted R-squared	0.859493	S.D. dependent var	1.10E+14	
S.E. of regression	4.14E+13	Akaike info criterion	65.77903	
Sum squared resid	8.55E+27	Schwarz criterion	66.25107	
Log likelihood	-483.3428	Hannan-Quinn criter.	65.77401	
F-statistic	10.51543	Durbin-Watson stat	2.680223	
Prob(F-statistic)	0.009252			

e. Uji Multikolonieritas

	PDDK	PDRB	UMKM
PDDK	1.000000	0.988570	0.961309
PDRB	0.988570	1.000000	0.980756
UMKM	0.961309	0.980756	1.000000